



PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

untuk SMP/MTs Kelas VII



Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
2022

Penafian: Buku ini merupakan buku referensi (rujukan) yang disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Penyusunan buku ini mengacu pada Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Standar Materi yang ditetapkan oleh BPIP. Oleh karena itu, buku ini dapat digunakan sebagai pengayaan pengetahuan tentang ideologi Pancasila di program pendidikan dan satuan pendidikan. Buku ini juga merupakan dokumen dinamis yang senantiasa dapat diperbaiki, diperbarui, dan dimutakhirkan sesuai dengan kebutuhan.

PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA UNTUK SMP/MTs KELAS VII

Penulis

Hilwan Givari, Raharjo, Muhammad Sapei

Penelaah

AT Sugeng Priyatno, Suhadi

Penyelia/Penyelaras

Supriyatno, Irene Camelyn Sinaga

Kontributor

Hery Setyawan, Robianto

Ilustrator

Aditya Candra Kartika

Editor

Rosyadah Khairani

Desainer

Muhammad Qodry Ramadhan

Penerbit

Penerbitan bersama antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Jalan Veteran III No. 2, RT 2/RW 3, Gambir, Kecamatan Gambir,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Jalan Jenderal Sudirman, Kompleks Kemendikbudristek, Senayan, Jakarta Pusat
10270

Dikeluarkan oleh:

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bekerja sama dengan
Pusat Perbukuan Kemendikbudristek

Cetakan Pertama, 2022

ISBN 978-623-8113-05-7 (no.jil.lengkap)

ISBN 978-623-8113-06-4 (jil.1)

Isi buku ini menggunakan huruf Opens Sans 11/16 pt., Steve Matteson
xiv,170 hlm.: 17,6 × 25 cm.



**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA**

SAMBUTAN KEPALA

Salam Pancasila!

Buku Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila ini merupakan buku referensi utama dalam rangka memperkaya pemahaman ideologi Pancasila pada seluruh satuan pendidikan formal jenjang PAUD, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/MAK. Buku referensi ini mengacu pada buku bahan ajar Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila (PPIP). Hadirnya buku bahan ajar berawal dari perintah Presiden RI Joko Widodo yang saat itu didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara RI dalam pertemuan terbatas di Istana Negara pada Februari 2021 dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo berpesan tentang pentingnya menanamkan nilai Pancasila dengan metode yang menyenangkan bagi peserta didik. Dalam upaya memenuhi harapan Presiden, proses penyusunan buku bahan ajar PPIP melibatkan sejumlah pakar dan praktisi bidang pendidikan dan ideologi Pancasila. Pada bulan Agustus 2021, buku bahan ajar PPIP selesai disusun oleh BPIP. Bertepatan dengan Perayaan Hari Lahir Pancasila di Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 1 Juni 2022, buku bahan ajar Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila diluncurkan sekaligus menandai dicanangkannya mata pelajaran Pendidikan Pancasila di semua jenjang pendidikan formal sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.

Dalam perkembangannya, buku bahan ajar tersebut belum dapat langsung dipergunakan dalam satuan pendidikan karena harus dilakukan penyesuaian terlebih dahulu dengan kurikulum Merdeka Belajar yang menjadi arus utama dalam pendidikan Indonesia saat ini. Untuk itu, dilakukan pendalaman kembali oleh BPIP bersama Kemendikbudristek dengan melibatkan unsur pakar dan praktisi bidang pendidikan dan ideologi Pancasila serta Anggota Dewan Pengarah BPIP dan Dewan Pakar BPIP. Sebagai hasilnya, buku bahan ajar yang telah diselaraskan ini ditetapkan menjadi buku referensi utama Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Penulisan buku referensi ini didasarkan pada fakta dan sejarah yang autentik sehingga mengembalikan pemahaman yang benar tentang Pancasila. Pemberian metode pembelajaran Pancasila yang berorientasi pada siswa (*student centered learning*) dapat membuat peserta didik lebih aktif terlibat dalam praktik dan pengalaman ber-Pancasila secara nyata yang selaras dengan kurikulum Merdeka Belajar. Cara penyampaian materi yang ada pada buku mendorong agar para peserta didik bisa mengeksplorasi rasa ingin tahu, kreativitas, serta sikap gotong-royong dalam meneladani Pancasila. Buku ini diharapkan dapat menjadi penuntun dalam memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila secara kontekstual.

Buku referensi PPIP ini menggunakan konsep “Tri Pusat Pendidikan” yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara untuk menyentuh seluruh warga sekolah, anggota keluarga di rumah, dan berbagai stakeholder terkait di lingkungan masyarakat agar terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Buku ini mengandung pesan bahwa sejatinya pembinaan Ideologi Pancasila, khususnya bagi generasi penerus, merupakan tanggung jawab yang harus dipikul bersama secara bergotong royong demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pengaktualisasian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari diyakini mampu mewujudkan negara Indonesia yang lebih baik dengan pengamalan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

Kepada semua pihak yang telah bergotong royong dengan tekun sedari awal menyusun buku bahan ajar dan buku referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila pada seluruh satuan pendidikan formal jenjang PAUD, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/MAK ini, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya dalam upaya untuk membumikan Pancasila kembali melalui pembelajaran di lingkungan pendidikan formal. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan rida dan karunia-Nya kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Jakarta, 12 Desember 2022

Kepala,



Prof. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Kemerdekaan Indonesia tidak hanya ditandai dengan keberhasilan bangsa kita untuk melepaskan diri dari penjajahan, tetapi juga dengan dirumuskannya suatu falsafah yang sarat makna, yakni Pancasila. Sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bertanah air, Pancasila mewakili nilai-nilai luhur yang senantiasa kita junjung sebagai masyarakat Indonesia, sekaligus menggambarkan mimpi dan harapan kita dalam membangun negara yang maju dan bermartabat.

Mengingat pentingnya makna dan peran Pancasila, kami di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui gerakan Merdeka Belajar telah berkomitmen untuk terus mengedepankan Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari penguatan karakter pelajar Indonesia.

Melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila sebagai bagian dari Kurikulum Merdeka, kami mendorong Pendidikan Pancasila yang jauh lebih relevan dan kontekstual sehingga anak-anak Indonesia dapat memaknai dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Hadirnya buku Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila yang lahir berkat kerja sama Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini merupakan langkah lanjutan dalam upaya kita bersama mewujudkan Pelajar Pancasila. Buku referensi ini memuat materi untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang Pancasila.

Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dan berkolaborasi dengan baik sehingga buku ini dapat terbit dan menjadi referensi bagi kita semua dalam melahirkan Pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Besar harapan saya bahwa buku Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila ini dapat memperkokoh ketahanan budaya bangsa serta membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter.

Mari kita terus bergerak serentak mewujudkan Merdeka Belajar, membawa Indonesia melompat ke masa depan dalam semangat Pancasila.

Jakarta, Januari 2023

Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi,



Nadiem Anwar Makarim

Petunjuk Penggunaan Buku

Sebelum menggunakan dan mempelajari buku ini, kalian perlu membaca petunjuk penggunaan buku untuk mempermudah memahami isi buku ini.



Capaian Kompetensi

Pada setiap bagian awal bab, buku ini menyampaikan keterangan mengenai capaian kompetensi peserta didik setelah mempelajari dan melakukan aktivitas-aktivitas di dalamnya.



Pengantar Materi

Pada bagian ini, peserta didik akan diantar memasuki pelajaran melalui narasi yang menguraikan latar belakang materi yang akan dipelajari di dalamnya.



Praktik Pengamalan Pancasila

Pada bagian ini peserta didik dikenalkan pada praktik-praktik pengamalan Pancasila yang terjadi di tengah kehidupan. Hal penting untuk memberikan contoh teladan bagi peserta didik agar dapat mengamalkan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari.



Penyajian Materi

Bagian ini berisi pemaparan tentang konsep-konsep terkait Pancasila yang tengah dipelajari pada bab. Penyampaian narasi tulisan dan ilustrasi gambar pada bagian ini disampaikan secara menarik guna memudahkan peserta didik dalam mempelajarinya.



Refleksi

Refleksi merupakan aktivitas yang mengajak peserta didik melakukan hal-hal yang membuat mereka merefleksi berbagai pengalaman belajar yang telah diterima.



Asesmen

Bagian ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menguji ketercapaian pembelajaran yang sudah dilakukan.

Glosarium

Bagian ini berisi daftar istilah-istilah penting yang terdapat dalam buku dengan penjelasan arti istilah, dan diurutkan secara alfabetis.

Daftar Isi

Sambutan Kepala	iii
Kata Pengantar	v
Petunjuk Penggunaan Buku	x
Daftar Isi.....	xii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Tabel.....	xv

Bab I

• Sejarah Kelahiran Pancasila	1
• Capaian Kompetensi	1
• Pengantar Materi.....	2
• Praktik Pengamalan Pancasila	3
• Penyajian Materi.....	8
• Refleksi	37
• Asesmen	40

Bab II

• Makna Lima Sila.....	41
• Capaian Kompetensi	41
• Pengantar Materi.....	42
• Praktik Pengamalan Pancasila	43
• Penyajian Materi.....	47
• Refleksi	64
• Asesmen	66

Bab III

• Pancasila sebagai Dasar Negara.....	69
• Capaian Kompetensi	69
• Pengantar Materi.....	70
• Praktik Pengamalan Pancasila	72

• Penyajian Materi	78
• Refleksi	86
• Asesmen	88

Bab IV

• Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa	89
• Capaian Kompetensi	89
• Pengantar Materi	90
• Praktik Pengamalan Pancasila	91
• Penyajian Materi	97
• Refleksi	111
• Asesmen	112

BAB V

• Pancasila sebagai Ideologi Negara	113
• Capaian Kompetensi	113
• Pengantar Materi	114
• Praktik Pengamalan Pancasila	116
• Penyajian Materi	124
• Refleksi	138
• Asesmen	139

Glosarium	142
------------------------	------------

Daftar Pustaka	145
-----------------------------	------------

Daftar Kredit Gambar	149
-----------------------------------	------------

Profil Pelaku Perbukuan	154
--------------------------------------	------------

Daftar Gambar

Gambar 1.1	4
Gambar 1.2	5
Gambar 1.3	6
Gambar 1.4.	7
Gambar 1.6	14
Gambar 1.7	16
Gambar 1.8	28
Gambar 1.9	33
Gambar 2.1	43
Gambar 2.2	45
Gambar 2.3	46
Gambar 2.4	49
Gambar 2.5	49
Gambar 2.6	51
Gambar 2.7	52
Gambar 2.8	59
Gambar 3.1	71
Gambar 3.2	77
Gambar 3.3	80
Gambar 3.4	82
Gambar 3.5	84
Gambar 4.1	91
Gambar 4.2	96
Gambar 4.3	99
Gambar 4.4	103
Gambar 4.5	105
Gambar 4.6	108

Gambar 4.7	110
Gambar 5.1	117
Gambar 5.2	121
Gambar 5.3	122
Gambar 5.4	128

Daftar Tabel

Tabel 2.1	53
Tabel 2.2	55
Tabel 2.3	56



Bab I

Sejarah Kelahiran Pancasila



Capaian Kompetensi

Setelah membaca dan memahami materi serta melakukan kegiatan yang terdapat dalam Bab I:

1. Peserta didik dapat menjelaskan sejarah kelahiran Pancasila
2. Peserta didik dapat menjelaskan sejarah perumusan Pancasila
3. Peserta didik dapat menjelaskan pengesahan Pancasila sebagai Dasar Negara.
4. Peserta didik dapat meneladani para tokoh pendiri bangsa dalam kehidupan sehari-hari.



Pengantar Materi

Selamat ya, kalian saat ini sudah lulus dari Sekolah Dasar (SD/MI) dan berada di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTS). Selama berlibur, apa saja kegiatan yang kalian lakukan? Apakah berwisata alam, bermain bersama teman, atau mengunjungi saudara? Apakah kalian juga mengunjungi tempat-tempat bersejarah? Selain menyenangkan, liburan ke tempat bersejarah juga dapat memberikan manfaat kepada kalian untuk meningkatkan perasaan cinta tanah air dan meneladani kisah-kisah para pahlawan bangsa.

Sungguh banyak sikap para tokoh pahlawan yang bisa kalian contoh. Seperti yang akan dibahas dalam bab ini, kalian tidak hanya diajak untuk mengunjungi tempat-tempat yang memiliki kisah sejarah menarik tentang kelahiran dan perumusan Pancasila, tetapi juga mengetahui berbagai tokoh pahlawan yang terlibat di dalamnya. Hal-hal seperti itu diharapkan bisa mendorong munculnya kesadaran dalam diri kalian untuk meneladani sikap-sikap mereka. Beberapa sikap tersebut di antaranya sebagai berikut:

Pertama, kebesaran tekad para pahlawan untuk melahirkan Pancasila dan memproklamkan kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan bangsa sendiri. Seperti yang nanti kalian baca, sejarah kelahiran Pancasila dan kemerdekaan Indonesia terjadi pada saat penjajahan Jepang. Persiapan kemerdekaan negara kita pada awalnya dibantu dan dibentuk oleh pemerintah Jepang. Namun, para tokoh pahlawan memiliki tekad yang kuat untuk tidak ingin diatur oleh penjajah Jepang. Selain itu, mereka juga melakukan tindakan-tindakan yang kreatif, cerdas, dan penuh semangat agar kemerdekaan Indonesia dapat dicapai sesegera mungkin.

Sebagai anak Indonesia yang baik, kalian seharusnya bisa mencontoh sikap para pahlawan. Kalian juga harus bertekad untuk dapat mengatur waktu secara cerdas agar dapat melakukan hal-hal yang bisa menunjang pencapaian pada masa depan, seperti belajar dengan tekun.

Kedua, sikap para pahlawan pendiri bangsa yang selalu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan diri dan golongan. Bukankah kalian sebagai remaja atau pelajar juga harus bersikap seperti itu? Kalian tidak boleh tumbuh menjadi manusia yang hanya memikirkan diri sendiri bahkan merugikan orang lain. Sama seperti para tokoh pendiri bangsa, kalian harus berkomitmen pada diri sendiri dan orang lain bahwa hidup kalian harus dimanfaatkan dengan baik untuk keluarga dan masyarakat.

Pengalaman sejarah tersebut harus dijadikan inspirasi mengingat masa-masa kalian saat ini merupakan awal dari kehidupan menjadi remaja. Satu fase hidup yang singkat sebelum menjadi dewasa dan siap meraih cita-cita. Oleh karena itu, bab pertama buku ini akan membuat kalian paham tentang sejarah Pancasila. Satu proses yang tidak hanya penting bagi bangsa dan negara Indonesia, tetapi juga memiliki banyak pelajaran berharga yang dapat dipetik. Bersikaplah seperti para tokoh pahlawan mampu memanfaatkan waktu dan memiliki tekad yang kuat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.



Praktik Pengamalan Pancasila

Melihat bukti-bukti sejarah di tempatnya secara langsung pasti akan lebih membantu kalian memahami hal-hal yang terjadi pada masa lampau. Termasuk di antaranya dengan melihat berbagai artefak-artefak kuno, lukisan, dan foto-foto asli, serta mungkin dengan membaca atau mendengarkan keterangan-keterangan seputar hal-hal bersejarah yang tersedia di sana. Maka dari itu, menjelajahi tempat-tempat bersejarah seperti Gedung Pancasila tentu menjadi hal yang menarik dan penting bagi kalian. Bukan hanya untuk memahami seluk-beluk peristiwa penting, tetapi juga untuk meneladani perjuangan para pahlawan pendiri bangsa yang terlibat di dalamnya.



Gambar 1.1 Tampak depan Gedung Pancasila

Sumber: Kemlu/travel.kompas.com (2021)

Gedung Pancasila merupakan bangunan bersejarah di Indonesia yang menjadi lokasi bagi peristiwa-peristiwa penting terkait kelahiran bangsa Indonesia. Selain menjadi tempat kelahiran Pancasila yang ditandai oleh peristiwa pidato Sukarno pada 1 Juni 1945, gedung ini juga menjadi tempat persidangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang bertugas menyusun Dasar Negara Undang-Undang Dasar.

Tidak ada catatan resmi mengenai kapan tepatnya gedung yang beralamat di Jalan Pejambon Nomor 6, Senen, Jakarta Pusat ini mulai dibangun. Beberapa data sejarah menunjukkan bahwa pembangunannya dilaksanakan kira-kira pada 1830. Pada masa itu, gedung berfungsi sebagai rumah kediaman Panglima Angkatan Perang Kerajaan Belanda. Namun, pada Mei 1918 Gubernur Jenderal Pemerintah Kolonial Belanda Limburg Stirum mengubahnya menjadi Gedung Volksraad. Volksraad sendiri merupakan sebuah dewan bagi rakyat kolonial yang wewenangnya sangat terbatas. Semula, dewan perwakilan tersebut hanya diberi hak untuk memberi nasehat kepada pemerintah, tetapi pada tahun 1927 dewan rakyat tersebut diberi wewenang untuk membuat undang-undang bersama-sama dengan Gubernur Jenderal. Namun

demikian, wewenang itu tidak banyak berarti karena Gubernur Jenderal selaku kepala negara dapat membatalkan undang-undang yang dihasilkan. Terbukti, selama empat belas tahun (1927-1941) bertugas di gedung ini, Volksraad hanya mampu menghasilkan enam rancangan undang-undang dan hanya tiga di antaranya yang diterima pemerintah.



Gambar 1.2 Lukisan Gedung Pancasila saat menjadi rumah Panglima Perang Hindia Belanda

Sumber: Josias Cornelis dan Rappard/tropenmuseum.nl (1881-1889)

Pada masa penjajahan Jepang, Gedung Volksraad ini beralih menjadi tempat diselenggarakannya sidang-sidang Cuo Sangi In atau Badan Pertimbangan Pusat. Pada dasarnya, badan yang didirikan pada 1943 ini memiliki tugas resmi untuk mengajukan usulan kepada Pemerintah Militer Jepang tentang hal-hal politik dan menyarankan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Militer di daerah penguasaannya.

Akan tetapi, pada kenyataannya keberadaan Cuo Sangi In yang beranggotakan tokoh-tokoh seperti Sukarno, Hatta, dan lain sebagainya itu justru dimanfaatkan para pahlawan untuk menjalankan usaha-usaha dalam membangkitkan semangat dan

kemampuan masyarakat untuk mencapai kemerdekaan. Usaha-usaha tersebut di antaranya: (1) Memperkuat cinta tanah air, (2) Membangkitkan rasa kekeluargaan dan persatuan bangsa, (3) Menyerahkan sekeasnya kekuasaan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah kepada tenaga Indonesia, dan (4) Memperluas perkembangan masyarakat dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Dengan demikian, pada era pemerintahan Jepang sebenarnya gedung ini tidak saja bersejarah karena dijadikan tempat bersidang bagi para anggota BPUPK yang melahirkan rumusan Pancasila dan UUD NRI 1945, tetapi juga menjadi tempat bagi para pendiri bangsa yang tergabung di Cuo Sangi In untuk menggelorakan semangat rakyat dalam perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia.



Gambar 1.3 Lukisan Foto Anggota-anggota BPUPK di dalam Gedung Pancasila

Sumber: Gromico/tirto.id (2017)

Pada masa setelah kemerdekaan, tepatnya pada 1951, gedung ini dialihkan kepada Departemen Luar Negeri (nama Kementerian Luar Negeri saat itu) sebagai tempat melaksanakan pendidikan bagi calon diplomat. Lalu, setelah dilakukan pemugaran selama dua tahun akibat kerusakan yang terjadi pada periode 1960-an, Presiden Republik Indonesia Kedua, Soeharto pada 19 Agustus 1975 meresmikan gedung yang terletak di Jalan Pejambon Nomor 6 Jakarta ini sebagai “Gedung Pancasila”. Upacara peresmian tersebut disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia kedua Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Mantan Wakil

Presiden Mohammad Hatta, para Menteri Kabinet, Kepala-kepala Perwakilan negara sahabat dan undangan lainnya.

Pada acara tersebut, Presiden Soeharto pun mengatakan bahwa, *"Salah satu cara yang tepat untuk meneruskan pengalaman dan memelihara semangat, tujuan, dan cita-cita kemerdekaan itu adalah memelihara dan mewariskan benda-benda, tulisan-tulisan dan tempat-tempat bersejarah kepada generasi yang akan datang, malahan juga alam pikirannya."*



Gambar 1.4. Kondisi lorong utama Gedung Pancasila saat ini

Sumber: Tentry/Okezone.com (2017)

Saat ini, Gedung Pancasila banyak dimanfaatkan oleh Kementerian Luar Negeri untuk mengadakan kegiatan-kegiatan internasional, seperti menjamu kedatangan para pemimpin negara asing, penandatanganan kerja sama luar negeri, dan lain sebagainya. Maka dari itu, jika mengunjunginya sekarang, kalian tidak hanya akan menemui benda-benda bersejarah yang menggambarkan sejarah gedung ini saja, tetapi juga furniture, perabot, dan berbagai

lukisan antik yang dipasang di seluruh ruangan untuk membuat nyaman para tamu negara yang datang. Terakhir, yang tak kalah penting untuk disampaikan, sejak 2017 lapangan yang menjadi halaman depan Gedung Pancasila, beberapa kali dipergunakan Pemerintah sebagai lokasi pusat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh setiap 1 Juni. Pada setiap pelaksanaannya, para peserta upacara beserta seluruh tamu undangan yang hadir diwajibkan untuk mengenakan pakaian tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Ini tidak hanya menggambarkan kekayaan tradisi ribuan suku di Indonesia, tetapi juga penting untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang diikat oleh Pancasila.

Bagaimana menurut pendapat kalian kisah Gedung Pancasila tersebut? Apakah membuat kalian tertarik untuk mengunjunginya? Bagi yang tinggal jauh dari Jakarta atau belum memiliki waktu untuk mendatangnya secara langsung, kalian tetap bisa berkunjung ke Gedung Pancasila secara daring Cukup dengan mengakses laman <https://youtu.be/BQ6FB5VqSBY> melalui komputer atau telepon seluler, kalian sudah bisa menikmati perjalanan virtual menelusuri berbagai ruangan di Gedung Pancasila beserta barang-barang antik yang terdapat di dalamnya. Apalagi selama mengikuti tur virtual ini, kalian akan dipandu oleh beberapa orang pemandu yang akan menjelaskan tentang hal-hal menarik seputar Gedung Pancasila. Cobalah akses laman tersebut, dan ceritakanlah di depan kelas tentang pengalaman-pengalaman menarik yang kalian temui selama mengikuti tur virtual tersebut.



Penyajian Materi

Episode penting dalam sejarah Indonesia adalah momentum kelahiran dan perumusan Pancasila. Kelahiran Pancasila tidak bisa dipisahkan dari dibentuknya BPUPK dan PPKI. BPUPK (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan) dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) adalah dua badan yang dirancang untuk mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan.

Sebetulnya kedua badan ini dibentuk atas anjuran pemerintah kolonial Jepang. Namun, para pemimpin tidak mau didikte dan menerima begitu saja anjuran mereka. Kedua badan tersebut dalam perjalanannya lebih banyak bekerja berdasarkan inisiatif dari para pemimpin Indonesia, terutama Sukarno dan Mohammad Hatta.

A. Kelahiran Pancasila

1. Pembentukan BPUPK

Bangsa Indonesia memiliki sejarah penjajahan yang panjang. Setelah dijajah oleh Belanda berabad-abad lamanya, pada 1942 bangsa Indonesia dikuasai oleh Jepang yang ditandai oleh perjanjian antara Belanda dengan Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada 8 Maret 1942. Selama menjajah bangsa Indonesia, Jepang dihadapkan pada posisinya yang semakin melemah untuk menghadapi serangan dari pihak tentara Sekutu (Inggris dan Amerika Serikat) dalam Perang Dunia II. Kenyataan tersebut membuat Jepang lantas menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Hal ini dilakukan Jepang dengan maksud untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia guna memenangkan peperangan yang tengah dilakukan.

Pada 1 Maret 1945, Jepang memenuhi janji tersebut dengan mengumumkan pembentukan *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan) untuk menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan. Akan tetapi, janji tersebut baru direalisasikan pada 29 April 1945. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa tanggal berdirinya BPUPK adalah 29 April 1945. Selain itu, dapat dijelaskan pula bahwa terjemahan yang tepat untuk *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Alasannya adalah karena badan ini dibentuk oleh Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-16 Jepang yang hanya memiliki wewenang untuk Jawa dan Madura saja, bukan untuk seluruh Indonesia. Sementara itu, di wilayah

Sumatera yang dipimpin oleh Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-25 Jepang baru diizinkan pendirian BPUPK untuk Sumatera pada 25 Juli 1945.

Selama menjajah Indonesia, Jepang membagi wilayah kekuasaannya menjadi tiga bagian yang masing-masing dipimpin oleh pemerintahan militer tersendiri, yakni:

Wilayah Sumatera dipimpin oleh Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara ke-25) dengan pusatnya di Bukittinggi.

Wilayah Jawa-Mandura dipimpin oleh Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara ke-16) dengan pusatnya di Jakarta.

Wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku yang dipimpin oleh Pemerintahan Militer Angkatan Laut (Armada Selatan Kedua) dengan pusatnya di Makassar.

Terakhir, wilayah Kalimantan dan Indonesia Timur yang berada di bawah kewenangan Pemerintahan Militer Angkatan Laut Jepang tidak pernah diizinkan untuk mendirikan pendirian lembaga persiapan kemerdekaan seperti di wilayah Jawa dan Sumatera.

Berdasarkan hasil penelitian sejarah yang dilakukan oleh Daradjadi dan Osa Kurniawan Ilham, diketahui bahwa Jepang menyusun keanggotaan BPUPK menjadi lima kelompok, yaitu:

1. Kelompok Birokrat (Residen, Bupati/Walikota, Kepala Kantor, Guru, dan lain sebagainya)
2. Kelompok Independen (pengacara, pengusaha, wartawan, dan lain sebagainya)
3. Kelompok Ulama
4. Kelompok Pergerakan Nasionalis
5. Kelompok Perwakilan Jepang

Di antara para anggota BPUPK tersebut terdapat beberapa orang peranakan (keturunan asing) selain pribumi dan Jepang. Empat orang di antaranya merupakan peranakan Tionghoa, satu orang peranakan Arab, dan satu orang peranakan Eropa. Perlu ditambahkan bahwa anggota BPUPK juga ada yang

perempuan, yaitu Maria Oelfa Santoso dan Nyonya R.S.S. Soenarjo Mangoenpoespito. Selain itu, di dalam BPUPK ada delapan orang anggota istimewa yang merupakan orang Jepang termasuk Itjibangase Yosio. Meskipun menjadi anggota, delapan orang Jepang tersebut tidak aktif di dalam sidang-sidang yang diadakan. Mereka lebih berperan sebagai pengamat. Sementara itu mengenai pimpinan, BPUPK diketuai oleh tokoh senior Indonesia kala itu, yaitu Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua R.P. Soeroso dan Itjibangase Yosio (Jepang).

Sebagaimana dicatat oleh A.B Kusuma dalam bukunya berjudul *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, keanggotaan BPUPK secara keseluruhan berjumlah 76 orang. Mereka terdiri dari 1 orang ketua (*Kaico*), 2 orang wakil ketua (*Fuku Kaico*), 60 orang anggota (*lin*), 6 anggota tambahan (baru menjadi anggota pada masa sidang kedua, 10 – 17 Juli 1945) dan 7 orang anggota istimewa (*Tokubetsu lin*) yang berasal dari Jepang. Selengkapnya, susunan nama-nama para anggota BPUPK adalah sebagai berikut.

Susunan Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan (BPUPK)

Ketua (*Kaico*):

Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat

Wakil Ketua/Ketua Muda (*Fuku Kaico*) :

Itjibangase Yosio dan R.P. Soeroso

Anggota (*lin*):

1. R. Abikoesno Tjokrosoejoso
2. H. A. Sanoesi
3. K.H. Abdoel Halim
4. Prof. Dr. R. Asikin Widjajakoesoema
5. M. Aris
6. R. Abdoel Kadir
7. Dr. R. Boentaran Martoatmodjo
8. B.P.H. Bintoro
9. Ki Hadjar Dewantara

- 
- 10.A.M. Dasaad
 - 11.Prof. Dr. P.A.H. Djajadiningrat
 - 12.Drs. Mohammad Hatta
 - 13.Ki Bagoes Hadikoesoemo
 - 14.Mr. R. Hindromartono
 - 15.Mr. Mohammad Yamin
 - 16.R.A.A. Soemitro Kolopaking Poerbonegoro
 - 17.Mr. Dr. R. Koesoema Atmadja
 - 18.Mr. J. Latuharhary
 - 19.R.M. Margono Djojohadikoesoemo
 - 20.Mr. A.A. Maramis
 - 21.K.H. Masjkoer
 - 22.K.H. M. Mansoer
 - 23.Moenandar
 - 24.A.K. Moezakir
 - 25.R. Otto Iskandar Dinata
 - 26.Parada Harahap
 - 27.B.P.H. Poeroebojo
 - 28.R. Abdoelrahim Pratalykrama
 - 29.R. Roeslan Wongsokoesoemo
 - 30.Prof. Ir. R. Rooseno
 - 31.H. Agoes Salim
 - 32.Dr. Samsi
 - 33.Mr. R.M. Sartono
 - 34.Mr. R. Samsedin
 - 35.Mr. R. Sastromoeljono
 - 36.Mr. R.P. Singgih
 - 37.Ir. Sukarno
 - 38.R. Soedirman

39. R. Soekardjo Wirjopranoto
40. Dr. Soekiman
41. Mr. A. Soebardjo
42. Prof. Mr. Dr. Soepomo
43. Ir. R. M. P. Soerachman Tjokroadisoerjo
44. M. Soetardjo Kartahadikoesoemo
45. R. M. T. A. Soerdjo
46. Mr. Soesanto
47. Mr. Soewandi
48. Drs. K. R. M. A. Sosrodiningrat
49. K. H. A. Wachid Hasjim
50. K. R. M. T. H. Woerjaningrat
51. R. A. A. Wiranatakoesoema
52. Mr. K. R. M. T. Wongsonegoro
53. Ny. Mr. Maria Oelfah Santoso
54. Ny. R. S. S. Soenarjo Mangoenpoespito
55. Oei Tjong Hauw
56. Oei Tiang Tjoei
57. Liem Koen Hian
58. Mr. Tan Eng Hoa
59. P. F. Dahler
60. A. R. Baswedan

Anggota Tambahan (Menjadi anggota pada masa sidang kedua, 10-17 Juli 1945)

1. K. H. Abdul Fatah Hasan
2. R. Asikin Natanegara
3. B. P. K. A. Soerjo Hamidjojo
4. Ir. Pangeran M. Noor
5. Mr. M. Besar

6. Abdul Kaffar

Anggota istimewa (*Tokubetsu lin*):

1. Tokonomi Tokuzi
2. Miyano Syoozoo
3. Itagaki Masamitu
4. Matuura Mitokiyo
5. Tanaka Minoru
6. Masuda Toyohiko
7. Ide Teitiroe



Gambar 1.6 Foto suasana sidang pertama BPUPK Pada 29 Mei 1945

Sumber: ANRI (2017)

Coba kalian perhatikan denah ruang sidang pada gambar di atas! Tata letaknya diatur rapi agar semua peserta bisa menyampaikan pandangannya secara leluasa. Adapun denah sidang BPUPK selengkapnya bisa kalian lihat pada gambar 1.7.

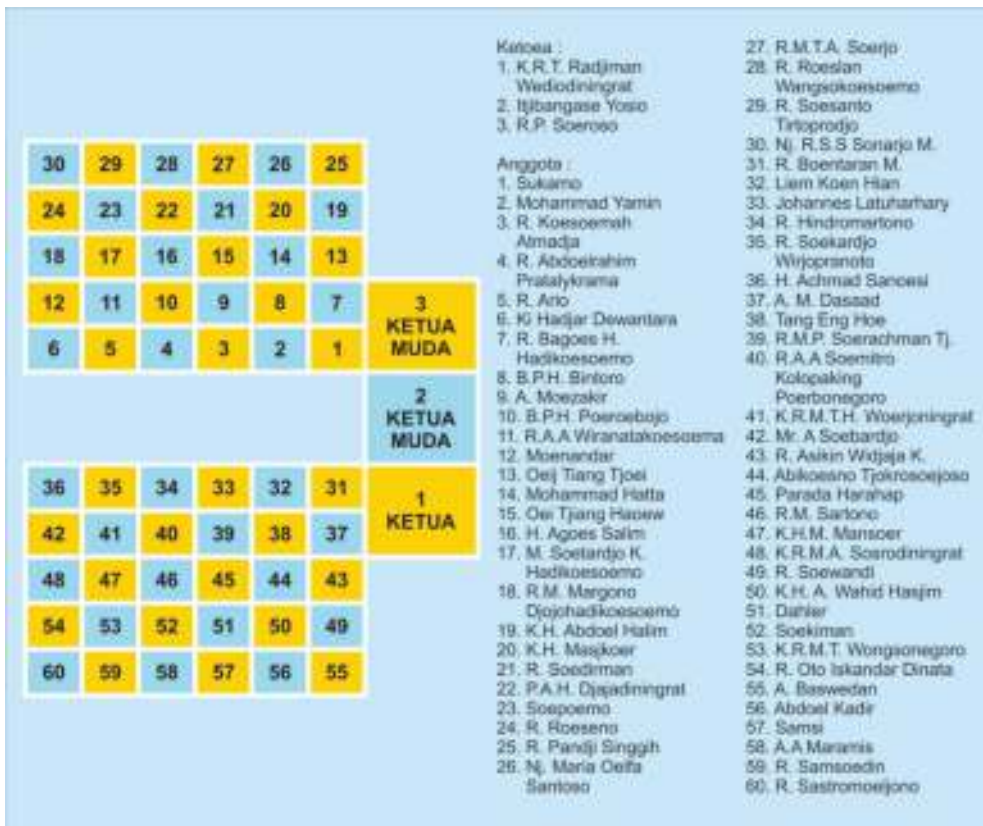
Sepanjang keberadaannya, Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan berlangsung dua kali, yakni:

1. Sidang pertama, berlangsung pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945.
2. Sidang kedua, berlangsung antara 10 sampai 17 Juli 1945.

Persidangan pertama adalah untuk menentukan dasar negara, sedangkan persidangan kedua ialah untuk menyusun Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia yang merdeka. Terkait dengan sidang pertama, sebetulnya ada banyak anggota sidang BPUPK yang berpidato menyampaikan pendapatnya. Akan tetapi, pendapat-pendapat dalam pidato mereka lebih terkait dengan bentuk negara, cara menjalankan pemerintahan, dan lain sebagainya. Selain itu, mereka juga khawatir pendapat dengan latar belakang pemikiran yang berbeda-beda tidak akan diterima oleh seluruh anggota sidang dan menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan.

Namun demikian, hal penting yang perlu dicatat adalah bahwa suasana persidangan pada saat itu relatif bebas dari gangguan dan tekanan penguasa Jepang sehingga setiap anggota BPUPK secara leluasa mengemukakan aspirasinya. Dengan demikian, berbagai pandangan yang muncul di dalam sidang adalah murni berdasarkan aspirasi dari para anggota BPUPK. Terlebih lagi, posisi Jepang dalam peperangan saat itu hampir menemui kekalahan. Karena itu, pemerintah kolonial Jepang mencoba menarik simpati dan dukungan dari rakyat Indonesia. Salah satu bentuk upaya menarik simpati itu adalah dengan memberi kebebasan kepada anggota BPUPK untuk mendiskusikan berbagai hal yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan bagi Indonesia.

Suasana sidang pertama BPUPK dapat digambarkan melalui desain tempat duduk seperti gambar di bawah. Dengan tempat duduk demikian, setiap peserta lebih mudah menyampaikan aspirasi dan berinteraksi satu sama lain. Karena meja dan kursi di tata bersebelahan dan berseberangan seperti itu, proses komunikasi dan musyawarah dapat berlangsung lebih baik karena setiap pembicara yang tampil di depan dapat melihat setiap peserta ke berbagai penjuru secara lebih mudah. Dari sisi sebaliknya, para peserta yang sedang duduk pun lebih mudah menyimak seseorang yang sedang menyampaikan pandangannya di bagian tengah ruang persidangan.



Gambar 1.7. Denah tempat duduk sidang BPUPK

Bagaimana menurut kalian tentang desain tempat duduk seperti itu? Apakah benar dapat membuat proses musyawarah mufakat berlangsung lebih baik? Cobalah kalian praktikkan di kelas bersama dengan teman-teman, satu kegiatan musyawarah untuk memutuskan hal-hal tentang kehidupan kelas seperti pemilihan ketua kelas, petugas piket mingguan, dan sebagainya. Dengan panduan guru/wali kelas yang bertindak sebagai ketua, lakukanlah musyawarah tersebut dengan tata letak kursi yang menyerupai desain sidang BPUPK di atas! Sebelum keputusan diambil, setiap siswa di kelas harus bisa menyampaikan pendapatnya tentang hal-hal yang sedang dibahas di dalam musyawarah.

2. Pidato 1 Juni 1945

Pada pembukaan sidang pertama BPUPK, satu pertanyaan dilontarkan oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat selaku ketua BPUPK dalam pidatonya. Satu pertanyaan itu berisi hal yang menjadi pokok pembahasan sidang pertama BPUPK. Pertanyaan itu berbunyi, “Apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk?”

Selama tiga hari berturut-turut (29-31 Mei 1945) para anggota *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* mengeluarkan pendapat-pendapat secara terbuka. Suasana persidangan memberikan kesempatan pada para anggota BPUPK untuk menyampaikan gagasan atau pemikirannya mengenai dasar negara. Terkait hal ini, sebetulnya ada banyak anggota BPUPK yang menyampaikan pendapatnya. Akan tetapi, berbagai pemikiran yang dilontarkan para anggota BPUPK mempunyai penekanan yang berbeda-beda. Ada yang menekankan kepada aspek ketuhanan, kemanusiaan, demokrasi, dan musyawarah saja. Berbagai penekanan yang berbeda-beda itu menyebabkan tidak ada satu pandangan yang dapat diterima oleh seluruh anggota sidang. Dalam hal ini, Mohammad Hatta dalam buku berjudul *Uraian Pancasila* yang diterbitkan tahun 1984 memberikan penjelasan bahwa para anggota BPUPK memang tidak ingin menjawab pertanyaan tentang dasar negara secara utuh. Mereka khawatir jawaban yang akan mereka sampaikan akan menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan di antara para anggota sidang.

Agenda sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha
Kemerdekaan Indonesia (BPUPK) 29 Mei – 1 Juni 1945

Hari/Tanggal	Pembicara
Selasa, 29 Mei 1945	1. Mohammad Yamin 2. R.M.Margono Djojohadikoesoemo 3. Drs. K.R.M.A. Sosrodiningrat 4. R.A.A. Soemitro Kolopaking Poerbonegoro 5. R.A.A. Wiranatakoesoema 6. K.R.M.T.H. Woerjaningrat 7. R.M.T.A Soerjo 8. Mr. Soesanto 9. R. Soedirman 10.A.M. Dasaad 11.Prof. Ir. R. Rooseno 12.M. Aris
Rabu, 30 Mei 1945	1. Drs. Mohammad Hatta 2. H. Agoes Salim 3. Samsuedin 4. Wongsonagoro 5. Ir. Soerachman 6. Soewandi 7. R. Abdoelrahim Pratalykrama 8. Dr. Soekiman 9. M. Soetardjo Kartahadikoesoemo
Kamis, 31 Mei 1945	1. R. Abdoel Kadir 2. Prof. Mr.Dr. Soepomo 3. Mr. R. Hindromartono 4. Mr. Mohammad Yamin 5. H.A. Sanoesi 6. Liem Koen Hian 7. Moenandar

	1. P.F. Dahler 2. Ki Bagoes Hadikoesoemo 3. Mr. Dr. R. Koesoema Atmadja 4. Oei Tjong Hauw 5. Parada Harahap 6. Dr. R. Boentaran Martoatmodjo
Jumat, 1 Juni 1945	1. A.R. Baswedan 2. A.K. Moezakir 3. R. Otto Iskandar Dinata 4. Sukarno (Pidato Lahirnya Pancasila) 5. Mr. J. Latuharhary 6. R. Soekardjo Wirjopranoto

Sumber: R.M. A.B. Kusuma. 2004. Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Oleh karena itu, satu-satunya orang yang menjawab secara utuh dan komprehensif pertanyaan Ketua BPUPK tentang dasar negara Indonesia adalah Sukarno. Dengan berpidato tanpa teks pada 1 Juni 1945 selama satu jam, yaitu sekitar pukul 09.00 sampai dengan 10.00, Sukarno dengan jernih dan runtut menjawab pertanyaan Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat tersebut dengan mengatakan,

"Sesudah tiga hari berturut-turut anggota-anggota Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya, maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka Tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pula pendapat saya... Ma'af, beribu ma'af! Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda, "filosofische grondslag" dari pada Indonesia merdeka".

Apa itu *filosofische grondslag*? *Filosofische grondslag* diambil dari bahasa Belanda yang artinya filsafat atau pikiran yang menjadi dasar dari sebuah negara. Berdasarkan pidatonya pada 1 Juni 1945, Sukarno mengemukakan bahwa *filosofische grondslag* atau pemikiran yang akan menjadi dasar bagi negara Indonesia merdeka harus bersifat kuat dan mencerminkan nilai-nilai paling mendasar, hakiki, dan penting untuk mengatur kehidupan bernegara yang didirikan di atasnya. Oleh karena itu, dalam pidatonya tersebut, Sukarno menjelaskan bahwa dasar negara yang diusulkannya bagi Indonesia merdeka adalah sebagai berikut.

1. Kebangsaan

Dasar pertama yang dikemukakan oleh Sukarno adalah kebangsaan. Dengan mengatakan bahwa:

“Pendek kata, bangsa Indonesia, Natie Indonesia, bukanlah sekadar satu golongan orang yang hidup dengan ‘le desir d’etre ensemble (keinginan untuk hidup bersama) di atas daerah yang kecil seperti Minangkabau, Madura, atau Yogya, atau Sunda, atau Bugis, tetapi bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia... yang telah ditentukan oleh Allah swt tinggal di kesatuan semua pulau-pulau Indonesia dari ujung Utara Sumatera sampai ke Irian! Seluruhnya!”

Dasar kebangsaan yang dimaksud bukan sekadar keinginan dari setiap orang yang memiliki kesamaan nasib dijajah untuk bersatu menjadi sebuah bangsa Indonesia, melainkan juga kebersatuan antara orang-orang yang menjadi bangsa Indonesia tersebut dengan tanah airnya.

2. Internasionalisme (perikemanusiaan)

Seperti pidato yang disampaikan Sukarno pada 1 Juni 1945.

“Tuan-tuan, jangan berkata, bahwa bangsa Indonesialah yang terbagus dan termulia, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia... Kita

bukan saja harus mendirikan negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Justru inilah prinsip saya yang kedua yang boleh saya namakan internasionalisme"

Bahwa internasionalisme sebagai dasar yang kedua merupakan penghargaan bangsa Indonesia terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai bagian dari umat manusia bangsa Indonesia hendaknya tidak boleh meremehkan bangsa-bangsa lain dan mesti menuju persaudaraan dunia.

3. Mufakat dan permusyawaratan/perwakilan (demokrasi)

Dasar ketiga bagi negara Indonesia merdeka yang diusulkan Sukarno adalah mufakat dan permusyawaratan/perwakilan (demokrasi). Seperti yang dijelaskan olehnya dalam Pidato 1 Juni bahwa:

"Kemudian, apakah dasar yang ke-3? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara "semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu". Saya yakin syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan."

Dengan dasar ketiga ini, Sukarno menginginkan bahwa negara Indonesia yang akan didirikan nanti merupakan milik bersama dan bekerja untuk semua rakyat Indonesia. Oleh karena itu, negara harus menjunjung tinggi setiap aspirasi rakyat Indonesia untuk di musyawarahkan dalam sebuah lembaga perwakilan rakyat yang bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

4. Kesejahteraan sosial

Dasar keempat yang diusulkan Sukarno adalah kesejahteraan sosial. Dengan dasar ini ingin diwujudkan kesejahteraan yang tidak hanya mencakup kelompok tertentu, tetapi kesejahteraan yang dapat dinikmati secara adil oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan itu, perwujudan kesejahteraan sangat lekat dengan prinsip keadilan. Seperti yang dijelaskan oleh Sukarno,

"Prinsip nomor 4 sekarang saya usulkan, yaitu prinsip kesejahteraan, prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan kurang pakaian, menciptakan dunia-baru yang di dalamnya ada keadilan."

5. Ketuhanan

Dasar kelima yang diusulkan oleh Sukarno adalah Ketuhanan. Seperti yang disampaikan olehnya,

"Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, Tuhannya sendiri... dan hendaknya negara Indonesia satu negara ber-Tuhan... ialah Ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, Ketuhanan yang hormat menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia merdeka berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa."

bahwa yang ber-Tuhan bukan hanya negara, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Dengan dasar ketuhanan ini, seluruh orang Indonesia dikehendaki untuk menjalankan ajaran agama yang diyakininya secara leluasa dengan cara yang berkeadaban, yakni saling menghargai dan menghormati perbedaan agama-agama lain.

Gagasan Sukarno tentang dasar negara Indonesia yang akan merdeka diberi nama Pancasila. Kata Pancasila sendiri berasal dari gabungan dua kata bahasa sanskerta, yaitu “panca” yang berarti lima dan “sila” yang berarti dasar. Sebelum menyelesaikan pidatonya, Sukarno menyatakan bahwa jangan mengira dengan tercapainya kemerdekaan, maka perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tujuannya. Kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan. Bangsa Indonesia harus mewujudkan cita-citanya pada masa kemerdekaan. Perjuangan mewujudkan hasrat dan cita-cita seluruh rakyat Indonesia hanya akan tercapai jika rakyat tidak takut menghadapi tantangan dan risiko. Sebagai penutup pidatonya pada 1 Juni Sukarno mengatakan, *“Kemerdekaan hanyalah didapat dan dimiliki oleh bangsa yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad, merdeka, merdeka atau mati!”*

B. Perumusan Pancasila

1. Panitia Delapan dan Panitia Sembilan

Pidato Pancasila Sukarno pada 1 Juni 1945 diterima oleh sidang BPUPK. Pada akhir persidangan pertama, dibentuk Panitia Kecil yang terdiri dari delapan orang dan diketuai oleh Sukarno. Tugas dari Panitia Kecil adalah menginventarisasi usul-usul para anggota BPUPK dan merumuskan Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang disampaikan oleh Sukarno. Adapun panitia kecil tersebut terdiri dari:

1. Sukarno
2. Mohammad Hatta
3. R. Otto Iskandar Dinata
4. K.H. A. Wachid Hasjim
5. Mohammad Yamin

6. Ki Bagoes Hadikoesoemo
7. M. Soetardjo Kartohadikoesoemo
8. A.A. Maramis

Sebagai ketua Panitia Kecil, Sukarno mengambil inisiatif untuk melakukan rapat dengan beberapa anggota BPUPK. Dalam sidang Chuo Sangi In (Badan Pertimbangan Pusat) yang diadakan pada 18-21 Juni 1945, ia mengumpulkan para anggota Chuo Sangi In yang kebetulan juga anggota BPUPK. Pada pertemuan ini, ia berhasil mengumpulkan 38 anggota BPUPK. Di akhir pertemuan, Sukarno berhasil membentuk panitia beranggotakan Sembilan orang yang bertugas menggantikan Panitia Kecil bentukan BPUPK. Penggantian ini dilakukan olehnya untuk dapat menghadirkan komposisi keanggotaan panitia yang lebih mewakili pemikiran-pemikiran tentang dasar negara yang berkembang di antara para anggota BPUPK. Belakangan, panitia yang bertugas merumuskan dasar negara tersebut dikenal dengan nama Panitia Sembilan yang terdiri dari:

1. Sukarno (ketua)
2. Mohammad Hatta
3. A.A. Maramis
4. K.H. A. Wachid Hasjim
5. Mohammad Yamin
6. Abdoel Kahar Moezakir
7. H. Agoes Salim
8. Abikoesno Tjokrosoejoso
9. Ahmad Soebardjo

Ketua Chuo Sangi In adalah Sukarno yang didampingi oleh dua orang wakil ketua, yaitu R.M.A.A. Koesoemo Oetoyo dan dr. Boentaran Martoatmodjo. Sepanjang sejarahnya, Chuo Sangi In melakukan sidang sebanyak delapan kali, termasuk di antaranya sidang terakhir yang diadakan pada 18-21 Juni 1945. Setelah persidangan terakhir tersebut, Chuo Sangi In tidak melakukan kegiatan-kegiatan lagi karena para anggotanya disibukkan berbagai persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Terlebih setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, maka Badan Penasihat Pusat atau Chuo Sangi In dibubarkan tanpa ada pernyataan resmi dari Pemerintah Militer Jepang.

(Sumber: Arniati Prasedyawati Herkusumo. 1984. *Chuo sangi-in Dewan Pertimbangan Pusat pada masa pendudukan Jepang*. Jakarta: Rosda Jayaputra)

Setelah bermusyawarah, Panitia Sembilan pada akhirnya berhasil merumuskan rancangan Pancasila di dalam sebuah dokumen yang dinamai oleh Mohammad Yamin sebagai "Piagam Jakarta". Sementara itu, Sukarno menyebutnya sebagai "Mukadimah", sedangkan Soekiman Wirjosandjojo menamakannya "*Gentlement Agreement*".

2. Sidang Kedua BPUPK

Sidang BPUPK kedua berlangsung pada 10-17 Juli 1945. Rumusan naskah rancangan Pembukaan UUD NRI 1945 yang disepakati pada 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dibacakan oleh Sukarno di dalam permulaan sidang itu. Di dalam naskah Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut, terdapat empat bagian penting, yaitu:

1. Bagian pertama merupakan pernyataan kemerdekaan. Pernyataan ini didasari oleh pengalaman bangsa Indonesia yang mengalami penjajahan atau kolonialisme selama ratusan tahun. Di dalamnya, termuat isi bahwa kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan hak seperti halnya yang harus dimiliki oleh seluruh bangsa yang ada di dunia. Karena itu, segala penjajahan di dunia harus dihapus karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan.
2. Bagian kedua menjelaskan hasil dari tuntutan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan rahmat Allah Yang Maha kuasa, bangsa Indonesia mencapai pintu gerbang kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita seluruh bangsa, yaitu masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
3. Bagian ketiga merupakan pernyataan tentang pembentukan pemerintahan negara Indonesia sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki tugas-tugas sebagai berikut.
 - a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
 - b. Memajukan kesejahteraan umum,
 - c. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
 - d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Di dalam bagian ketiga Naskah Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut, terdapat rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara berikut.

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Selain menyepakati rancangan rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara beserta Piagam Jakarta sebagai Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), sidang kedua BPUPK menyepakati pula rancangan batang tubuh UUD NRI 1945 yang tersusun atas pasal-pasal. Dengan hadirnya kesepakatan tersebut, Sidang Kedua BPUPK ditutup pada 17 Juli 1945. Sidang itu sekaligus menjadi akhir tugas dari BPUPK.

C. Pengesahan Pancasila sebagai Dasar Negara

Setelah tugas-tugas BPUPK berakhir dan dibubarkan, pada 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pembentukan PPKI terjadi setelah sehari Jepang makin terhipit dalam perang karena tentara sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Mengetahui posisi Jepang yang semakin melemah, para tokoh nasional terus mendesak kemerdekaan kepada Jepang. Desakan itulah yang kemudian membuat pemerintahan kolonial Jepang melalui perwira tingginya, Hisaichi Terauchi menyetujui pembentukan PPKI. Anggota-anggota PPKI yang baru berdiri terdiri dari 21 orang.

Sebelum dilanjutkan, cobalah kalian perhatikan sejumlah nama yang disebut di atas. Mungkin kalian akan kesulitan mengejanya. Hal itu dikarenakan nama mereka masih menggunakan ejaan lama. Huruf U ditulis OE, Y ditulis J, H ditulis CH, C ditulis TJ, dan J ditulis dengan huruf DJ.

Dengan Sukarno sebagai ketua dan Mohammad Hatta sebagai wakil, anggota PPKI pada awal mula pendiriannya adalah Soepomo, K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, R.P. Soeroso, Soetardjo Kartohadikoesoemo, K.H. Wahid Hasjim, Ki Bagus Hadikoesoemo, Otto Iskandardinata, Abdoel Kadir, Pangeran Soerjohamidjojo, Pangeran Poerbojo, Mohammad Amir, Abdoel Abbas, Mohammad Hasan, GSSJ Ratulangi, Andi Pangerang, A.H. Hamidan, I Goesti Ketoet Poedja, Johannes Latuharhary, dan Yap Tjwan Bing. Akan tetapi, tanpa sepengetahuan Jepang anggota PPKI ditambah enam orang. Mereka adalah Achmad Soebardjo, Sayoeti Melik, Ki Hadjar Dewantara, R.A.A. Wiranatakoesoema, Kasman Singodimedjo, dan Iwa Koesoemasoemantri. Dengan demikian, jumlah anggota PPKI menjadi 27 orang. Pada intinya, tugas utama PPKI adalah melanjutkan tugas BPUPK. Hal tersebut terdiri dari seluruh persiapan dan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, PPKI berkewajiban pula untuk meyakinkan masyarakat terkait kemerdekaan Indonesia.



Gambar 1.8. Foto Repro Anggota-anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Sumber: Soeara Asia/Kompas (2020)

Coba lihat foto-foto Anggota PPKI di atas, apakah kalian telah mengenal mereka? Dengan panduan guru, buatlah biografi singkat untuk 5 dari 21 orang yang wajahnya terdapat dalam gambar tersebut! Silakan kalian pilih sendiri lima nama tersebut. Masing-masing biografi untuk setiap orang dapat dibuat (maksimal) sebanyak satu halaman kertas berukuran A4 dengan menggunakan tulisan tangan atau diketik. Kalian bisa memasukkan keterangan-keterangan seperti tempat dan tanggal lahir, jabatan yang pernah diduduki, atau hal-hal terkait dengan peran mereka di dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia di dalam biografi tersebut. Selain buku-buku sejarah atau pelajaran sekolah lainnya, kalian bisa memperoleh data-data terkait dengan para pahlawan tersebut di banyak situs internet yang menulis tentang mereka.

PPKI belum bersidang, terjadi perubahan mendadak karena pada 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu dan sejak saat itu Indonesia kosong dari kekuasaan. Momentum ini lantas dimanfaatkan oleh para pemuda untuk mendesak Sukarno dan Hatta segera memproklamkan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda lalu mengadakan rapat pada 15 Agustus 1945 malam di Pegangsaan Timur, Jakarta untuk mempersiapkan kemerdekaan. Rapat yang dipimpin oleh tokoh pemuda bernama Chaeroel Saleh ini menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak rakyat Indonesia, tidak tergantung dari pihak lain, termasuk Jepang. Usai rapat, Wikana dan Darwis diutus oleh para pemuda malam itu juga untuk menemui Sukarno dan Hatta. Mereka menuntut kepada Sukarno dan Hatta agar proklamasi kemerdekaan dilakukan esok harinya pada 16 Agustus 1945. Akan tetapi, Sukarno dan Hatta menolak permintaan para pemuda tersebut. Seperti yang disampaikan dalam buku *Konflik di Balik Proklamasi* yang disusun

oleh St. Sularto dan Dorothea Rini Yunarti, Sukarno menolak permintaan mereka dengan alasan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak bisa dilakukan secara gegabah dan harus dibahas dengan para anggota PPKI yang telah terbentuk.

Gagal membujuk Sukarno dan Hatta, kelompok pemuda tersebut kembali mengadakan rapat. Dikutip dari buku tulisan Haryono Riandi berjudul *Proklamasi 17 Agustus 1945: Revolusi Politik Bangsa Indonesia*, rapat dilaksanakan di Jalan Cikini 71, Jakarta pada pukul 00.30. Rapat tersebut dihadiri para tokoh muda termasuk di antaranya Chaeroel Saleh, Djohar Noer, Koesnandar, Soebadio, Margono, Soekarni, Singgih, dan lainnya. Dalam rapat itu para pemuda bersepakat untuk mengamankan Sukarno dan Hatta ke luar kota agar jauh dari pengaruh Jepang. Tak berselang lama, tepat pukul 04.30 dini hari pada 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Sukarno dan Hatta ke Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat. Aksi ini awalnya dilakukan untuk menekan kedua tokoh tersebut agar bersedia memproklamirkan kemerdekaan sesegera mungkin di tempat itu. Akan tetapi, meski para pemuda menyampaikan desakan tersebut selama berulang kali kepada Sukarno dan Hatta, kedua tokoh bangsa tersebut tidak bergeming.

Achmad Soebardjo, yang merupakan salah satu tokoh dari golongan tua, mengetahui peristiwa tersebut. Di Jakarta, ia bertemu dengan Wikana, salah seorang tokoh pemuda. Di dalam pertemuan tersebut, mereka berdua bersepakat bahwa kemerdekaan harus dideklarasikan di Jakarta. Selanjutnya, Achmad Soebardjo bersama dengan Soediro dan Jusuf Kunto menuju Rengasdengklok untuk menjemput Sukarno-Hatta dan membawa keduanya kembali ke Jakarta.

Sekembalinya di Jakarta pada malam hari pada 16 Agustus 1945, rombongan Sukarno-Hatta bersama para pemuda telah bersepakat bahwa proklamasi kemerdekaan RI paling lambat akan dideklarasikan di Jakarta pada 17 Agustus 1945. Maka dari itu, mereka kemudian mencari tempat yang dirasa aman untuk merumuskan naskah Proklamasi. Perumusan naskah Proklamasi terjadi di rumah Laksmana Tadashi Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang. Lokasi itu dipilih sebagai lokasi perumusan naskah teks Proklamasi pada dini hari, 17 Agustus 1945 karena alasan keamanan dan kedekatan Tadashi Maeda dengan Achmad Soebarjo dan Mohammad Hatta.

Ada beberapa orang yang hadir dalam peristiwa perumusan naskah Proklamasi di rumah Laksmana Tadashi Maeda, yaitu Sukarno, Mohammad Hatta, Ahmad Soebardjo, Soediro, Soekarni, B.M. Diah, serta beberapa orang Jepang seperti Laksmana Tadashi Maeda, Shigetada Nishijima, Tomegoro Yoshizumi dan Miyoshi. Namun demikian, tidak semua orang tersebut terlibat secara langsung. Menurut Mohammad Hatta dan Achmad Soebardjo dalam bukunya masing-masing yang berjudul *"Untuk Negeriku"* dan *"Lahirnya Republik Indonesia"*, penyusunan naskah proklamasi terjadi di ruang makan rumah Laksmana Maeda. Pada awalnya di ruangan tersebut terdapat Sukarno, Mohammad Hatta, Laksmana Maeda, Miyoshi, dan dirinya. Namun demikian, ketika Naskah Proklamasi hendak dirumuskan, Laksmana Maeda dan Miyoshi berangsur-angsur mengundurkan diri sehingga tersisa tiga orang di ruangan tersebut yaitu Sukarno, Mohammad Hatta, dan Achmad Soebardjo.

Dalam momen perumusan naskah Proklamasi yang bersejarah itu, Sukarno mempersilakan Mohammad Hatta untuk menyusun teks proklamasi yang ringkas karena dianggap memiliki bahasa terbaik. Namun demikian, menurut Mohammad Hatta, Sukarno-lah yang lebih baik menulis, sementara ia mendiktekannya. Lalu, Sukarno memegang pena dan menulis Teks Proklamasi yang terdiri dari dua kalimat. Kalimat pertama, *"Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia,"* adalah kalimat yang diambil dari bagian akhir alinea ketiga Piagam Jakarta. Sementara itu kalimat kedua, *"Hal-hal yang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnja,"* berasal dari pemikiran Mohammad Hatta yang kemudian mendapatkan koreksi atau perbaikan.

Setelah naskah proklamasi selesai dirumuskan, para tokoh bangsa yang hadir saat itu membicarakan mengenai tempat pembacaan naskah proklamasi. Atas pertimbangan keamanan, Sukarno memilih bahwa pembacaan naskah proklamasi akan diadakan di halaman depan rumah kediamannya, Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56, pukul 10.00 WIB pada 17 Agustus 1945.

Sehari setelah pembacaan naskah proklamasi, PPKI melakukan tiga kali sidang. Jadi, sidang PPKI baru digelar setelah proklamasi kemerdekaan. Sidang pertama, digelar pada 18 Agustus 1945 dengan putusan: (1) Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Memilih Sukarno sebagai presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden, (3) Membentuk komite nasional untuk membantu tugas Presiden sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Sidang kedua, pada 19 Agustus 1945 menghasilkan: (1) Pembagian wilayah Indonesia yang terdiri atas delapan provinsi, (2) Membentuk Komite Nasional (daerah), (3) Menetapkan dua belas departemen/kementerian dengan masing-masing menteri. Sidang ketiga, pada 22 Agustus 1945 menghasilkan keputusan: (1) Pembentukan Komite Nasional,

(2) Pembentukan Partai Nasional Indonesia, (3) dan Pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR.

Terkait dengan Pancasila menjadi Dasar Negara, sidang hari pertama merupakan peristiwa penting. Pada sidang pertama tersebut, hadir kelompok pemuda yang diwakili oleh tiga orang tokoh terkemuka, yaitu Chaeroel Saleh, Soekarni, dan Wikana. Di dalam sidang, Chaeroel Saleh memberikan kritik keras kepada PPKI yang dianggapnya sebagai lembaga yang sangat dipengaruhi oleh Jepang. Karena Indonesia sudah merdeka, ia menuntut agar semua yang berkaitan dengan Jepang harus dihilangkan dan mendesak agar rapat dipindahkan ke tempat yang lebih terbuka sehingga rakyat dapat mengikuti apa yang sedang terjadi. Selain itu, Chaeroel Saleh juga mengajukan agar PPKI diubah menjadi Komite Nasional Indonesia atau KNI.



Gambar 1.9. Patung perumusan naskah proklamasi di Museum Perumusan Naskah Proklamasi

Sumber: Kompas/Luck Pransiska/www.kompas.com (2016)

Mohammad Hatta, seperti ditulisnya dalam buku *"Untuk Negeriku"*, menjawab tuntutan para pemuda yang disuarakan Chaeroel Saleh dengan mengatakan bahwa, *"Kepada Jepang kami katakan bahwa rapat ini adalah rapat panitia, dan terhadap rakyat kami tanggung jawabkan bahwa rapat ini adalah rapat Komite Nasional Indonesia pertama"*. Sukarno mendukung sepenuhnya pernyataan Mohammad Hatta tersebut.

Permasalahan berikutnya yang muncul pada sidang pertama itu adalah adanya suara keberatan dari para pemeluk agama selain Islam terhadap kalimat di dalam rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang tertulis, *Ketoehanan, dengan kewajiban mendjalankan sjariat Islam bagi pemeloek-pemeloeknja*". Adanya suara keberatan tersebut diketahui oleh Mohammad Hatta pada sore hari 17 Agustus setelah ia berbicara dengan seorang perwira Angkatan Laut Jepang. Perwira tersebut mengatakan para penganut agama non Islam di Indonesia bagian timur merasa didiskriminasi dengan adanya kalimat di atas. Jika kalimat itu tidak diganti, mereka lebih memilih untuk berdiri di luar Republik Indonesia yang baru merdeka.

Menanggapi itu, Mohammad Hatta sebagai wakil ketua PPKI mengajak para tokoh Islam mengadakan rapat pada pagi hari tanggal 18 Agustus 1945 untuk membahas kata-kata, *"Ketoehanan, dengan kewajiban mendjalankan sjariat Islam bagi pemeloek-pemeloeknja"* yang terdapat dalam rancangan Pembukaan UUD NRI 1945. Dalam catatan sejarah, rapat tersebut hanya berlangsung selama lima belas menit dengan kesepakatan penting, yaitu mengubah kata-kata tersebut menjadi *"Ketoehanan Jang Maha Esa"*.

Setelah rapat itu, PPKI mengadakan sidang pertamanya. Sidang tersebut dapat terlaksana dengan cepat karena tokoh-tokoh Islam lebih mengutamakan persatuan bangsa di atas kepentingan lainnya. Sidang PPKI dibuka pukul 11.30 WIB dengan dihadiri 27

orang anggota. Sukarno mengawali sidang tersebut dengan pidato yang mengingatkan para anggota PPKI bahwa mereka sedang berada dalam zaman peralihan yang berubah secara cepat. Karena itu mereka harus menyesuaikan diri dengan bertindak cepat pula. Selain itu, Sukarno juga mengatakan, *"Janganlah kita terlalu tertarik oleh kehendak yang kecil-kecil saja, tetapi marilah kita menurut garis besar saja yang mengandung sejarah"*. Akhirnya, PPKI pun mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat rumusan Pancasila di dalam Pembukaannya. Maka dengan itu, Pancasila pun telah sah menjadi Dasar Negara.

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945
PEMBUKAAN**

(P r e a m b l e)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(Dikutip dari: Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang MPR Tahun 2002 sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi tanpa ada opini)

Dengan melihat keseluruhan proses kelahiran dan perumusan Pancasila menjadi Dasar Negara, kalian pasti paham bahwa proses kesejarahan tersebut diawali dengan kelahirannya pada 1 Juni 1945, lalu diikuti oleh perumusan pada 22 Juni 1945 dan disahkan kemudian oleh sidang PPKI yang berlangsung pada 18 Agustus 1945. Pada hari pengesahannya itu, para pahlawan pendiri bangsa Indonesia bermufakat bahwa Pancasila adalah Dasar Negara Indonesia yang terdiri dari:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Setelah mempelajari bagian ini, bacalah dengan lantang naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tadi di depan kelas secara bergantian dengan panduan gurumu!



Refleksi

Bagaimana perasaanmu setelah membaca materi sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila di atas? Pengalaman sejarah tersebut sungguh harus dijadikan inspirasi bagi kalian dalam menjalani kehidupan pada awal masa-masa remaja. Mengingat masa-masa remaja merupakan masa peralihan yang singkat sebelum menjadi dewasa dan siap meraih cita-cita. Untuk itu, kalian pun harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin, seperti halnya sikap para tokoh pahlawan pendiri bangsa yang tergambar dalam penyajian materi di atas. Sebelum mengerjakan tugas-tugas yang tersedia pada bagian tindak lanjut dan evaluasi, refleksikan terlebih dahulu hal-hal yang telah kalian pelajari melalui gambar infografis di bawah ini.

Infografis Alur Sejarah Kelahiran, Perumusan, dan Pengesahan Pancasila sebagai Dasar Negara



Sebagai tindak lanjut setelah mempelajari hal-hal di atas, lakukanlah beberapa aktivitas berikut:

1. Cari naskah pidato Sukarno 1 Juni 1945 melalui internet atau sumber lain. Bacalah pidato Sukarno tersebut dan rekam dengan menggunakan telepon seluler atau perangkat lain. Unggahlah dalam media sosial yang kamu miliki. Kirimkan laman media sosial tersebut kepada gurumu!
2. Buatlah poster tentang hari kelahiran Pancasila dan cantumkan kata- kata atau kalimat yang paling kamu sukai dari pidato Sukarno, 1 Juni 1945, lalu unggahlah ke laman media sosial yang kamu miliki!
3. Buatlah kelompok yang terdiri dari tujuh orang untuk memainkan peran terkait peristiwa-peristiwa bersejarah dari tanggal 15-18 Agustus 1945 sebagaimana diceritakan pada bagian penyajian materi di atas. Adapun pembagian peran tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Sukarno
 2. Mohammad Hatta
 3. Achmad Soebardjo
 4. Laksmana Maeda
 5. Chaeroel Saleh
 6. Soekarni
 7. Wikana



Asesmen

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar!

1. Mengapa kelahiran Pancasila dirayakan setiap tanggal 1 Juni?
2. Mengapa terjemahan yang tepat dari Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai yang diketuai oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), bukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)?
3. Menurut kalian, apakah ada perbedaan antara peran BPUPK dan PPKI dalam sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila? Jelaskanlah perbedaan tersebut!
4. Mengapa Sukarno dan Hatta menolak permintaan para pemuda untuk memproklamkan kemerdekaan Indonesia pada 16 Agustus 1945?
5. Dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, Sukarno menyebut Pancasila sebagai *filosofische grondslag*. Jelaskanlah apa yang dimaksud dengan filosofische grondslag!

Bab II

Makna Lima Sila



Capaian Kompetensi

Setelah membaca dan memahami materi serta melakukan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Bab II:

Peserta didik dapat menguraikan makna lima sila dalam Pancasila secara utuh.

1. Peserta didik dapat menguraikan nilai-nilai yang terdapat dalam kelima sila Pancasila dengan benar.
2. Peserta didik dapat mengembangkan sikap-sikap keteladanan seorang relawan sebagai bentuk pengamalan Pancasila.
3. Peserta didik dapat mempraktikkan perilaku positif berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.



Pengantar Materi

Pada bab II ini, kalian akan mempelajari makna lima sila Pancasila dan keterhubungannya satu sama lain. Namun sebelum membahasnya lebih dalam, kalian akan diajak terlebih dahulu untuk membahas praktik pengamalan Pancasila yang berkaitan dengan makna lima sila tersebut. Contoh praktik yang disajikan adalah tulisan berjudul “Petualangan Menjadi Relawan”. Relawan adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas tanpa pamrih apapun. Selain dapat membentuk karakter kalian supaya menjadi orang yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila, mengetahui hal-hal yang dilakukan relawan dalam cerita tersebut juga bisa membuat kalian paham cara-cara bergaul dengan bangsa lain (internasional) dalam hubungan yang setara. Hubungan antarbangsa yang berperikemanusiaan seperti yang diajarkan Pancasila, khususnya sila kedua.

Selanjutnya, sub bab penyajian materi akan mengajak kalian belajar secara lebih utuh tentang makna lima sila Pancasila. Makna lima sila Pancasila merupakan pandangan hidup atau pendirian bangsa yang sudah membudaya, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Dalam hal ini, kalian harus memahami seluruh sila di dalam Pancasila sebagai satu kesatuan. Maksudnya, kelima sila Pancasila tidak dapat dilihat secara terpisah-pisah atau sendiri-sendiri. Kesemuanya memiliki makna yang harus dipahami secara utuh dan sistematis.



Praktik Pengamalan Pancasila

Petualangan Menjadi Relawan

Tahukah kalian bahwa Sumba merupakan salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur yang memiliki sekolah pariwisata internasional dan diperuntukkan bagi siswa miskin? Sekolah pariwisata internasional tersebut bernama Sumba Hospitality Foundation. Sekolah tersebut merupakan hasil kerja sama para relawan, pemerintah, dan sejumlah pengusaha di sekitar dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Sumba. Seperti yang mungkin diketahui, Sumba termasuk wilayah bagian Provinsi Nusa Tenggara Timur yang pada 2020 memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 1.146.320 jiwa. Oleh karena itu, tujuan pendirian sekolah Sumba Hospitality Foundation adalah untuk memajukan pendidikan dan kesempatan kerja, khususnya bagi masyarakat miskin yang tinggal di sekitar.



Gambar 2.1. Foto Sekolah Pariwisata Internasional Sumba Hospitality Foundation

Sumber: Sumba Hospitality Foundation (2021)

Sekolah perhotelan internasional Sumba *Hospitality Foundation* didirikan dengan cara menggalang dana dari para donatur. Para donatur tersebut banyak di antaranya pengusaha hotel mewah yang berlokasi di sekitar sekolah. Banyaknya tempat wisata, seperti Laguna Weekuri, Desa Ratenggaro, Pantai Nihiwatu, dan sebagainya yang menyebabkan kawasan di sekitar sekolah Sumba Hospitality Foundation didirikan hotel-hotel mewah. Namun demikian, sayangnya masih banyak anak-anak muda Sumba yang bekerja di hotel-hotel mewah tersebut tidak mampu bekerja di posisi yang lebih tinggi. Salah satunya penyebab adalah rendahnya kemampuan mereka berkomunikasi dengan Bahasa Inggris.

Setiap tahun, anak-anak dari sekitar Sumba yang akan masuk sekolah Sumba Hospitality Foundation diseleksi secara merata dari keempat kabupaten, yakni Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Sumba Barat, dan Sumba Tengah. Selain diajarkan tentang perhotelan dan kepariwisataan, para siswa di sekolah itu juga akan diajak berkomunikasi dalam bahasa Inggris, baik dalam pembelajaran maupun selama tinggal di sekolah.

Seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah, sekolah Sumba Hospitality Foundation adalah sekolah tanpa dinding dan beratap alang-alang. Sekolah tanpa dinding mempunyai makna keterbukaan bagi semua orang, tidak memandang perbedaan kelas dan golongan. Sekolah mengajak semua orang dari semua negara untuk terlibat sebagai donatur, pengajar, dan relawan dalam pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Selama ini, beberapa pengajar dan pendamping siswa merupakan tenaga sukarela yang datang dari beberapa negara, seperti Indonesia, Jerman, Italia, Kosta Rika, Australia, Belgia, Amerika Serikat, Belanda, Singapura dan Luxemburg.



Gambar 2.2. Foto aktivitas belajar Sekolah Pariwisata Internasional
Sumba Hospitality Foundation

Sumber: Sumba Hospitality Foundation (2021)

Sekolah membuka kesempatan kepada relawan muda untuk berpartisipasi dalam pengajaran dan pendampingan siswa, seperti komunikasi dalam Bahasa Inggris, memasak, menyanyi, olah raga, berkebun, pengolahan sampah organik, dan sebagainya. Relawan tinggal dengan siswa di asrama yang disediakan selama beberapa hari atau bulan. Relawan bisa mendaftarkan diri dengan cara menulis surat dan dikirim melalui *email* ke pengurus sekolah. Setiap tahun banyak sekali yang mendaftar sebagai relawan dan pengurus sekolah akan menyeleksi relawan-relawan tersebut. Beberapa pelajaran yang bisa dipetik ketika menjadi relawan di sekolah ini adalah:

1. Menghargai keanekaragaman agama yang dianut siswa, relawan, guru, dan pengelola sekolah.

2. Belajar berkomunikasi dalam Bahasa Inggris dan mengenal serta menghargai perbedaan teman-teman dari negara lain.
3. Belajar melestarikan alam dengan menanam tanaman-tanaman untuk penghijauan dan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, relawan diajak mengelola sampah dan limbah menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan kembali.
4. Mengolah pertanian organik yang berkelanjutan. Relawan akan diajari cara mencintai dan memanfaatkan potensi alam tanpa melakukan eksploitasi, sehingga alam tetap terjaga dan lestari. Hasil dari pertanian organik tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi semua orang yang ada di sekolah.

Dengan membaca contoh Sumba Hospitality Foundation di atas, pasti kalian sudah paham bahwa dengan menjadi relawan akan sangat banyak pengalaman menarik yang bisa ditemui. Pengalaman-pengalaman yang tentunya sangat terkait dengan upaya kalian dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti bersikap saling tolong menolong, melestarikan lingkungan, serta saling membantu dengan orang-orang dari beraneka ragam agama, ras, suku, antar golongan, bahkan antar negara. Nah, sebelum dilanjut ke bagian selanjutnya, lihatlah gambar-gambar di bawah ini!



Gambar 2.3. Berita di media masa mengenai Relawan Cilik

Sumber: Tempo/Febri Angga Palguna/www.tempo.co (2022) dan Republika/Dok LMI/www.republika.co.id (2019)

Gambar-gambar tersebut menampilkan berita di media masa mengenai keberadaan anak-anak seusia kalian yang menjadi relawan. Ada yang membersihkan lingkungan, menyebarkan cara-cara menghadapi bencana alam, dan lain sebagainya. Lalu pertanyaannya, pernahkah kalian menjadi relawan seperti mereka atau mungkin terlibat dalam suatu aktivitas yang bertujuan menolong orang lain atau masyarakat di sekitar kalian? Seperti kerja bakti membersihkan lingkungan, menjadi panitia perlombaan peringatan hari kemerdekaan, dan lain sebagainya. Jika pernah, coba tuliskan pengalaman kalian tersebut secara singkat di selembar kertas sebanyak dua sampai tiga paragraf! Jika sudah selesai, bacakanlah di depan kelas dengan panduan guru.



Penyajian Materi

Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta yaitu “panca” yang berarti lima dan “sila” berarti dasar. “Lima dasar” yang penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Susunan dan rumusan sila-sila Pancasila secara resmi tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sila-sila Pancasila tersebut merupakan kesatuan yang bulat dan utuh serta sistematis. Mengenai hal ini, Mohammad Hatta berpendapat bahwa sila-sila Pancasila tidak berdiri sendiri-sendiri dan saling terpisah, melainkan membentuk satu kesatuan nilai yang saling terkait. Misalnya, jika sila pertama dihubungkan dengan sila kedua, maka hubungan tersebut mesti dimaknai sebagai ketuhanan (sila pertama) yang diimani dan diamalkan dalam bentuk kasih sayang kepada sesama manusia (sila kedua). Atau sebaliknya, kasih sayang kita pada sesama manusia (sila kedua) harus dilandasi oleh keimanan pada Tuhan (sila pertama). Hubungan antarsila seperti itu terjadi pada setiap sila satu per satu.

A. Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini memiliki makna yang dalam bagi bangsa Indonesia terkait dengan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sikap saling menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaan. Melalui sila pertama, negara memberikan jaminan kepada setiap penduduknya untuk memeluk agama dan melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dengan demikian, selain mengakui keberadaan agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, negara juga mengakui kepercayaan yang dianut oleh suku-suku di Indonesia sebelum agama-agama yang dianut oleh mayoritas tersebut muncul.

Selain itu, sila Ketuhanan Yang Maha Esa juga bermakna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang saling menghargai perbedaan keyakinan beserta praktik-praktik ibadah umat beragama lain. Harapannya, selain menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama ini juga akan membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang senantiasa bersikap tenggang rasa

dengan saling menghormati terhadap perbedaan agama yang ada. Sikap ini pada akhirnya akan memunculkan kehidupan masyarakat yang beradab, nyaman, dan harmonis.



Gambar 2.4. Foto ilustrasi kerukunan umat beragama di Indonesia

Sumber: Redaktur/Bogordaily (2020)



Gambar 2.5. Ilustrasi pernyataan Sukarno terkait makna Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pidato "Lahirnya Pancasila"

Dalam kehidupan sehari-hari, pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini dapat dilakukan dengan contoh-contoh sikap dan perilaku seperti rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh ajaran agamanya, tidak mencela kepercayaan dan praktik beribadah agama lain, tidak membedakan perlakuan kepada teman karena agama yang dianut, serta selalu mengedepankan sikap dan perilaku tolong-menolong di antara para pemeluk agama di masyarakat agar tercipta kehidupan yang rukun. Bagaimana menurut kalian? Apakah praktik-praktik pengamalan sila pertama tersebut telah terlihat di lingkungan sekolah atau masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian? Diskusikanlah dengan empat orang temanmu dalam satu kelompok untuk menjawab pertanyaan. Bagaimana membuat orang-orang di masyarakat dapat mengamalkan sila pertama Pancasila? Tuliskanlah hasil diskusi tersebut di kertas selembat! Setelah itu, sampaikanlah hasil diskusi tersebut di depan kelas dengan panduan guru.

B. Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan sila kedua Pancasila. Sila ini bermakna negara dan seluruh bangsa Indonesia harus memuliakan martabat manusia. Sila Kedua pada intinya didasari oleh nilai kemanusiaan yang menjadi prinsip dalam pergaulan sehari-hari, baik dengan sesama bangsa Indonesia, maupun dengan orang-orang dari bangsa lain. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai kemanusiaan dalam sila kedua dapat kalian terapkan dengan memunculkan sikap saling menghargai, menghormati hak kewajiban setiap orang, dan lain sebagainya.



Gambar 2.6. Ilustrasi tolong-menolong sebagai praktik pengamalan Sila Kedua Pancasila

Praktik pengamalan sila ke-2 sangat luas maknanya, termasuk di antaranya saling tolong menolong di antara sesama teman. Terkait dengan hal itu, buatlah kelompok yang terdiri dari lima orang murid sekelas untuk mendiskusikan rencana gotong royong untuk membantu teman-teman di kelas yang sedang memerlukan bantuan! Mungkin ada di antara kalian yang sedang sakit dan perlu dijenguk, ada teman di kelas yang perlu dibantu belajar untuk mengejar ketertinggalannya pada pelajaran tertentu, dan ada juga yang sedang memiliki kesulitan untuk pergi ke sekolah karena sepedanya rusak. Diskusikanlah rencana gotong royong tersebut beserta dengan pembagian tugas di antara masing-masing anggota kelompok. Setelah selesai, presentasikanlah rencana tersebut di depan kelas dengan panduan guru.

C. Sila ketiga: Persatuan Indonesia

Sila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Sila ini merupakan landasan untuk mempersatukan rakyat Indonesia yang memiliki keberagaman agama, suku, ras, dan golongan. Dengan demikian, sila Persatuan Indonesia menghendaki agar seluruh bangsa Indonesia dapat selalu mengembangkan persatuan di tengah aneka perbedaan yang ada. Selain untuk menciptakan kerukunan hidup di tengah masyarakat, persatuan juga menjadi hal utama yang perlu diwujudkan dalam keseharian demi cita-cita atau tujuan bersama bangsa Indonesia, yaitu kehidupan yang adil dan makmur. Tidaklah mungkin cita-cita tersebut dapat tercapai jika bangsa Indonesia hidup secara tercerai-berai.

Kita hendak mendirikan suatu negara bangsa, semua buat semua,
bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan
bangsawan, maupun golongan kaya,
tetapi, semua buat semua.

(Sukarno, Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945)



Gambar 2.7. Foto Ilustrasi Keberagaman Budaya di Indonesia

Sumber: balipuspanews/www.balipuspanews.com (2017)

Di samping itu, sila Persatuan Indonesia juga mengajarkan bangsa Indonesia untuk cinta terhadap tanah airnya. Dengan demikian, sila ketiga Pancasila ini tidak hanya menghendaki agar kita mencintai keanekaragaman budaya dan tradisi seluruh suku bangsa yang ada, tetapi juga lingkungan alam Indonesia yang dipenuhi beraneka ragam flora dan fauna. Mengembangkan rasa cinta tanah air dengan mengedepankan kepedulian terhadap kelestarian budaya dan lingkungan alam yang seperti ini bukan hanya bermanfaat untuk kita yang hidup pada saat ini, tetapi juga generasi bangsa Indonesia yang hidup di masa-masa mendatang.

Terkait dengan hal tersebut, buatlah kelompok yang terdiri dari tiga sampai lima orang siswa di kelasmu untuk mengerjakan tugas-tugas berikut yang dapat meningkatkan rasa cinta kalian terhadap bangsa dan tanah air Indonesia!

1. Cinta keanekaragaman budaya nusantara

Sebagai sebuah bangsa yang besar, Indonesia memiliki ratusan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayahnya. Berdasarkan informasi yang kalian peroleh dari buku pelajaran, artikel di internet, dan lain sebagainya, isilah tabel di bawah ini dengan satu (1) nama suku yang hidup di provinsi-provinsi di Indonesia beserta dengan nama pakaian adatnya.

Tabel 2.1. Keanekaragaman suku dan pakaian adat di Indonesia

No.	Provinsi	Nama Suku	Pakaian Adat
1	Aceh		
2	Sumatra Utara		
3	Sumatra Barat		
4	Riau		
5	Kepulauan Riau		

6	Jambi		
7	Bengkulu		
8	Sumatra Selatan		
9	Kepulauan Bangka Belitung		
10	Lampung		
11	Banten		
12	Daerah Khusus Ibukota Jakarta		
13	Jawa Barat		
14	Jawa Tengah		
15	Daerah Istimewa Yogyakarta		
16	Jawa Timur		
17	Bali		
18	Nusa Tenggara Barat		
19	Nusa Tenggara Timur		
20	Kalimantan Barat		
21	Kalimantan Tengah		
22	Kalimantan Selatan		
23	Kalimantan Timur		
24	Kalimantan Utara		
25	Sulawesi Barat		
26	Sulawesi Selatan		
27	Sulawesi Tenggara		
28	Sulawesi Tengah		
29	Gorontalo		
30	Sulawesi Utara		

31	Maluku Utara		
32	Maluku		
33	Papua Barat		
34	Papua		
35	Papua Selatan		
36	Papua Tengah		
37	Papua Pegunungan		
38	Papua Barat Daya		

2. Cinta Keanekaragaman Hayati Indonesia

Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat luas. Keanekaragaman hayati tersebut jumlahnya sangat tinggi. Pada sisi flora atau tumbuhan, Indonesia memiliki sekitar 40.000 jenis spesies tumbuhan berbiji, 80.000 jenis spesies jamur, dan lain sebagainya yang sangat berguna untuk kelestarian lingkungan termasuk untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Terkait dengan hal tersebut, isilah tabel di bawah ini dengan nama-nama jenis tumbuhan yang banyak di temukan di sekitar tempat tinggal kalian dan pemanfaatannya bagi manusia.

Tabel 2.2. Keragaman tumbuhan di sekitar dan pemanfaatannya

No.	Nama Tumbuhan	Pemanfaatan
1	Kelapa	Bahan makanan minuman, bahan bangunan
2		
3		
4		
5		
6		

Sementara itu, keanekaragaman fauna atau hewan di Indonesia juga tidak kalah hebatnya. Dengan tiga wilayah persebaran yang terdiri dari Barat (Asiatis), Tengah (Peralihan), dan Timur (Australis), Indonesia memiliki tak kurang dari 8.157 jenis fauna vertebrata (bertulang belakang), seperti mamalia, burung, dan ikan, 1.900 jenis kupu-kupu, dan masih banyak lagi. Terkait dengan hal tersebut, isilah tabel di bawah ini dengan jenis-jenis fauna pada wilayah persebaran Barat (Asiatis), Tengah (Peralihan), dan Timur (Australis)!

Tabel 2.3. Keanekaragaman fauna di Indonesia

Fauna Indonesia Bagian Barat (Asiatis)	1. Gajah
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
Fauna Indonesia Bagian Tengah (Peralihan)	1. Anoa
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

Fauna Indonesia Bagian Timur (Australis)	1. Burung Cendrawasih
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

D. Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sila ini bermakna bahwa negara Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi berdasarkan Pancasila. Secara sederhana, demokrasi itu sendiri dapat dimaknai bahwa negara dan pemerintahan didirikan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selain itu, sila keempat bermakna pula bahwa demokrasi di Indonesia tersebut harus dilaksanakan melalui mekanisme permusyawaratan dan perwakilan yang didasari atas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Sebagaimana juga yang disampaikan Mohammad Hatta, demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah demokrasi yang berjalan di atas kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, kesucian, dan keindahan.

Demokrasi yang dianut bangsa Indonesia adalah demokrasi yang berjalan di atas kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, kesucian, dan keindahan.

(Mohammad Hatta)

Dengan itu, pelaksanaan demokrasi Pancasila memungkinkan siapa pun boleh menjadi pemimpin di Indonesia. Ini merupakan amanat yang terkandung dalam UUD NRI 1945. Sebagai contoh, Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD, dan kepala-kepala daerah (gubernur dan walikota/bupati). Semuanya dilaksanakan dengan menganut asas "LUBER" (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) dan "JURDIL" (Jujur dan Adil). "Langsung" berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. "Umum" berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. "Bebas" berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. "Rahasia" berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

Asas "jujur" mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas "adil" adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.

Demokrasi berdasarkan Pancasila merupakan cara untuk membangun bangsa Indonesia. Demokrasi ini ditopang oleh sila-sila lainnya, yakni sila ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Terkait dengan sila kemanusiaan misalnya, pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia harus juga bisa menjamin hak-hak asasi warga negara, salah satunya hak berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan tulisan sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 28 UUD NRI 1945. Jaminan terhadap hak asasi manusia tersebut sebetulnya tidak terhenti pada hak

itu, tetapi juga hak-hak lain yang terdapat dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, seperti agama, sosial, ekonomi, serta budaya.



Gambar 2.8. Foto ilustrasi Pemilihan Umum

Sumber: Septianda Perdana/bisnis.com (2019)

Contoh praktik pengamalan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kalian lakukan adalah memilih ketua kelas. Sistem pelaksanaan pemilihan ketua kelas disusun bersama. Proses pelaksanaannya mulai dari penyusunan aturan pemilihan ketua kelas, penentuan kriteria ketua kelas, dan sebagainya diatur oleh semua siswa. Pelaksanaan pemilihan ketua kelas ini pun dapat dilaksanakan dengan musyawarah mufakat. Dalam proses tersebut, semua siswa mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk dipilih dan memilih. Ketua kelas yang terpilih tentu saja merupakan hasil kesepakatan dan persetujuan bersama semua siswa. Terkait dengan hal tersebut, lakukanlah simulasi pemilihan ketua kelas dengan tahapan-tahapan sebagai berikut!

Tahapan Pemilihan Ketua Kelas

Penetapan kriteria ketua kelas oleh guru

Pada tahap yang pertama ini, guru memberikan penjelasan tentang kriteria seorang ketua kelas di antaranya disiplin, jujur, adil, amanah, dan pintar.

Penulisan nama-nama calon (kandidat) ketua kelas oleh setiap murid

Pada tahap ini, setiap siswa diminta menuliskan nama salah seorang temannya yang dianggap memiliki kriteria tersebut di dalam selembar kertas. Setelah selesai menulis, seluruh siswa mengumpulkan selembar kertas tersebut di meja guru untuk kemudian dicari empat (4) nama murid yang paling banyak disebut sebagai kandidat ketua kelas.

Pemilihan ketua kelas

Setelah terpilih empat (4) nama sebagai kandidat ketua kelas, selanjutnya setiap siswa diminta untuk memilih satu (1) dari empat (4) nama kandidat tersebut dengan menuliskannya dalam selembar kertas dan dikumpulkan di meja guru. Di tahap ini, guru harus memberi tahu bahwa nama yang dipilih oleh seorang siswa tidak boleh diketahui oleh temannya. Selain itu, ia juga tidak boleh mengajak temannya untuk mengikuti pilihannya.

Penghitungan suara

Setelah seluruh kertas dari setiap siswa terkumpul, maka tahap terakhir adalah penghitungan suara. Pada tahap ini, nama siswa yang mendapatkan suara terbanyak, terpilih menjadi ketua kelas, Sementara itu, nama siswa yang mendapatkan peringkat kedua, ketiga, dan keempat masing-masing terpilih menjadi wakil ketua kelas, sekretaris, dan bendahara.

E. Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini bermakna bahwa pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah untuk mewujudkan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Satu kehidupan sejahtera yang semua orang di dalamnya dapat berbahagia karena tidak ada kemiskinan, penghinaan, penindasan, dan lain sebagainya. Dengan itu, sila kelima sebenarnya menjadi dasar sekaligus cita-cita yang hendak diwujudkan oleh negara maupun kita semua sebagai bangsa Indonesia.

Seperti juga yang kalian dapat baca dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat di bawah, selain menjadi bagian dari Dasar Negara, keadilan sosial merupakan juga tujuan yang harus dilaksanakan oleh seluruh elemen negara dan bangsa Indonesia. Dengan itu, keadilan sosial merupakan langkah yang menentukan untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Contoh praktik kehidupan sehari-hari dari sila kelima ini adalah bersikap tidak boros dan ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Selain itu, bentuk pengamalan yang lain adalah berani bersikap adil dan menolong orang yang lemah. Selain untuk dapat mencapai hubungan yang lebih harmonis, sikap dan perilaku tersebut juga bermanfaat untuk menciptakan kesejahteraan hidup bersama sebagai bangsa Indonesia.

Sebelum dilanjutkan, buatlah kelompok terdiri dari lima orang untuk mendiskusikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seputar pengamalan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari yang terdapat di dalam kotak di bawah ini! Jawaban kelompok hasil diskusi dapat ditulis di selembar kertas untuk di presentasikan di depan kelas dengan panduan guru.

Sekolah ingin mengadakan wisata saat liburan mendatang. Seluruh siswa diharapkan mengikuti kegiatan tersebut dan membayar biaya wisata sesuai kebutuhan. Namun demikian, beberapa orang siswa memilih tidak ikut karena tak mampu membayar biayanya. Menurut kalian, apa yang perlu dilakukan untuk kebaikan bersama?

Andi berasal dari keluarga mampu. Baju dan semua yang dipakai Andi serba mahal dan buatan luar negeri. Andi berpendapat kalau barang mahal dan buatan luar negeri pasti bagus. Dengan itu, Andi tidak mau menggunakan produk berharga murah, apalagi yang dibuat di dalam negeri. Bagaimana sikap kalian terhadap Andi yang berperilaku seperti itu?

Sebagai penutup bagian ini, berikut disampaikan beberapa nilai dalam setiap sila Pancasila agar kalian dapat memahami lebih dalam makna yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana uraian di atas, nilai-nilai tersebut sifatnya tak terpisahkan satu sama lain serta harus dipahami dan diamalkan oleh kalian yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Mengacu pada Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang diterbitkan pada tahun 2017, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah sebagai berikut:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

- 1) Bangsa Indonesia melaksanakan perintah agama dan kepercayaannya masing-masing dengan tetap mengedepankan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Bangsa Indonesia tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

b. Kemanusiaan yang adil dan beradab

- 1) Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan universal yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengembangkan persaudaraan berdasarkan nilai-nilai keadilan dan keadaban.
- 2) Bangsa Indonesia mengakui dan memperlakukan kesederajatan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa tepa selira dan memahami bahwa perbedaan suku, ras, agama, dan kepercayaan adalah keniscayaan yang tidak boleh menimbulkan pertentangan.

c. Persatuan Indonesia

- 1) Persatuan Indonesia adalah sikap kebangsaan yang saling menghormati perbedaan dan keberagaman masyarakat dan bangsa Indonesia.
- 2) Bangsa Indonesia mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- 3) Segenap warga negara Indonesia mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa serta bersedia berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
- 4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

- 1) Negara Indonesia bukan sebuah negara yang didirikan untuk satu golongan tetapi untuk semua yang bertanah air Indonesia. Oleh karena itu, penyelenggaraan negara didasarkan pada permusyawaratan perwakilan.
- 2) Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dengan mengutamakan prinsip permusyawaratan dalam lembaga perwakilan rakyat.
- 3) Bangsa Indonesia wajib menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah dan dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.

e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

- 1) Negara Indonesia didirikan untuk bersungguh-sungguh memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia baik lahir maupun batin.
- 2) Tiap warga bangsa Indonesia tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.



Refleksi

Setelah membaca sub bab praktik pengamalan Pancasila dan penyajian materi di atas, refleksikanlah bentuk-bentuk pengamalan sila-sila Pancasila yang kalian temui dalam cerita *"PETUALANGAN MENJADI RELAWAN"* dengan mengisi tabel di bawah ini. Buat ulang tabel tersebut dalam buku tugas kalian, lalu isilah seluruh kolom yang tersedia dengan mengikuti contoh yang sudah disampaikan di dalamnya.

Pengamalan Sila-sila Pancasila
dalam Cerita “Petualangan Menjadi Relawan”

Sila-sila Pancasila	Bentuk Pengamalan
Sila Pertama	1. Menghargai keanekaragaman agama yang dianut siswa, relawan, guru, dan pengelola sekolah.
	2.
Sila Kedua	1.
	2.
Sila Ketiga	1.
	2.
Sila Keempat	1.
	2.
Sila Kelima	1.
	2.

1. Buatlah sebuah karangan sepanjang tiga-empat paragraf yang menceritakan pengalaman kalian mengamalkan salah satu sila di dalam Pancasila selama duduk di SMP/MTS kelas VII. Tulislah karangan tersebut pada buku tugas untuk dipresentasikan di depan kelas dengan bimbingan guru.
2. Buatlah kelompok yang terdiri dari empat-lima orang untuk mendiskusikan contoh-contoh perilaku pengamalan Pancasila yang dapat ditemui sehari-hari di sekolah. Tuliskanlah contoh-contoh tersebut di dalam tabel yang kalian buat pada buku tugas kalian. Seperti yang dapat dilihat di bawah ini, tabel tersebut memiliki kolom Sila-Sila Pancasila serta bentuk-bentuk pengamalan yang harus kalian isi dengan contoh-contoh perilaku yang dapat kalian temui sehari-hari di sekolah.

Pengamalan Pancasila
dalam Kehidupan Sehari-hari di Sekolah

Sila-sila Pancasila	Bentuk Pengamalan
Sila Pertama	1.
	2.
Sila Kedua	1.
	2.
Sila Ketiga	1.
	2.
Sila Keempat	1.
	2.
Sila Kelima	1.
	2.



Asesmen

A. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan Benar!

1. Jelaskanlah makna yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia!
2. Jelaskan apa yang di maksud dengan toleransi? Mengapa dalam kehidupan antar umat beragama di Indonesia memerlukan toleransi!
3. Pelaksanaan demokrasi Pancasila harus bisa menjamin hak-hak warga negara, salah satunya hak berserikat, berkumpul, serta

mengeluarkan pikiran dan tulisan sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 28 UUD 1945. Sebutkan secara lengkap bunyi pasal 28, dan 28J UUD 1945 beserta ayat-ayatnya!

4. Mengapa kegiatan pemilihan ketua kelas dapat disebut sebagai bentuk pengamalan Pancasila sila keempat?
5. Salah satu nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila adalah “Setiap warga bangsa Indonesia tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.” Berikanlah dua contoh perilaku keseharian kalian yang dianggap mencerminkan pengamalan nilai tersebut!

B. Isilah kolom sila-sila Pancasila dan maknanya di bawah ini!

Di bawah ini terdapat tiga bentuk sikap/perilaku yang mencerminkan nilai-nilai dalam Pancasila. Isilah kolom-kolom di bawahnya dengan menyebut sila Pancasila yang dicerminkan oleh sikap/perilaku tersebut serta makna yang terkandung dalam sila itu. Ikutilah contoh berikut ini:

Contoh:

Menghargai kepercayaan agama orang lain yang berbeda.

Bentuk pengamalan sila	Sila pertama
Makna yang terkandung	Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa yang selalu bertoleransi dan menghargai perbedaan praktik-praktik ibadah umat beragama lain.

1. Memunguti sampah yang berserakan di lingkungan sekolah.

Bentuk pengamalan sila	
Makna yang terkandung	

2. Mengumpulkan donasi untuk meringankan beban salah satu siswa yang sedang sakit dan membutuhkan biaya.

Bentuk pengamalan sila	
Makna yang terkandung	

3. Ikut serta dalam kegiatan pentas seni dan budaya daerah.

Bentuk pengamalan sila	
Makna yang terkandung	

Bab III

Pancasila sebagai Dasar Negara



Capaian Kompetensi

Setelah membaca dan memahami materi serta melakukan kegiatan yang terdapat dalam Bab III:

1. Peserta didik dapat menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum negara.
2. Peserta didik dapat menyebutkan hubungan Pancasila dengan Pembukaan dan Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Peserta didik dapat menyebutkan contoh peraturan perundang-undangan yang dijiwai oleh sila-sila Pancasila.
4. Peserta didik dapat menunjukkan sikap sadar dan patuh terhadap hukum dan norma yang berlaku di masyarakat sebagai bentuk pengamalan Pancasila.



Pengantar Materi

Selamat ya kalian sudah mempelajari sejarah kelahiran Pancasila dan makna sila-sila Pancasila. Semoga kalian bisa menghayati keteladanan para pendiri bangsa dalam dinamika perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, kalian juga bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Setelah kalian mempelajari sejarah kelahiran Pancasila dan makna sila-sila Pancasila, pada bab ini kalian akan mempelajari Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum negara.

Kalian pasti mengetahui bangunan kan? Semakin tinggi bangunan, semakin dalam pula fondasinya. Mengapa? Fondasi itulah yang menopang tegaknya bangunan tersebut. Ia akan tetap tegak berdiri meski dihempas badai. Kalian juga pasti mengetahui pohon kan? Apa yang membuat pohon tegak dan kokoh? Ya, akar yang menghunjam ke dalam tanah menjadikan pohon tegak tinggi menjulang.

Demikianlah gambaran Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan fondasi bagi tegaknya Negara Indonesia. Semakin kokoh pengamalan Pancasila dalam bernegara, semakin kokoh pula bangunan Negara Indonesia. Indonesia sebagai negara besar dengan puluhan provinsi, belasan ribu pulau, dan ratusan juta jiwa penduduknya dengan keragamannya, perlu landasan atau fondasi kokoh untuk dapat tetap menopang tegak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan tersebut berupa nilai-nilai yang terdapat dalam lima sila Pancasila. Nilai-nilai itu pula yang menjadi dasar penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dalam penyelenggaraan Negara Indonesia. Setiap negara mesti memiliki landasan dengan cara apa negara tersebut diselenggarakan.



Gambar 3.1 Pancasila merupakan dasar Negara Indonesia.

Sumber: Kompas.com/Vanya Karunia Mulia Putri/www.kompas.com (2022)

Ada negara yang mendasarkan penyelenggaraan negaranya atas dasar kapitalisme, komunisme, sekularisme, dan lainnya. Bagi Negara Indonesia dasar penyelenggaraan negara tersebut adalah Pancasila, yaitu lima sila dasar yang menjadi fondasi dalam semua aspek penyelenggaraan negara.

Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, nilai-nilai Pancasila menjiwai dan menjadi acuan dalam perumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia.

Setiap peraturan perundang-undangan yang dirumuskan, baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang bertabrakan dengan nilai-nilai Pancasila.

Nah, bagaimana kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum negara? Mari kita kaji bersama. Namun, sebelumnya kalian mesti belajar mempraktikkan pengamalan Pancasila sebagaimana ditulis di bawah ini ya.



Praktik Pengamalan Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara bukan hanya landasan filosofis, namun semestinya juga diterjemahkan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Setiap warga negara mesti menampilkan praktik pengamalan Pancasila dalam aktivitasnya, sehingga nilai-nilai Pancasila terasa membumi.

Pancasila dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan negara, tercermin dari adanya berbagai lembaga negara, hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bernegara, hak azasi manusia sebagaimana diatur dalam pasal-pasal UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan.

Praktik pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum negara di antaranya dapat diwujudkan dengan menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan norma di masyarakat. Kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dapat diartikan sebagai kesadaran dan kepatuhan seseorang atau suatu kelompok masyarakat terhadap peraturan, hukum, dan norma yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan norma sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini bertujuan agar terwujud ketertiban, kedamaian, keharmonisan, dan keadilan dalam pergaulan antarsesama di masyarakat. Berikut ini beberapa contoh pengamalan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan norma dalam kehidupan sehari-hari.

Setelah membaca beberapa contoh pengamalan kesadaran dan

No	Contoh perilaku	Keterangan
1.	Menghentikan kendaraan saat lampu lalu lintas berwarna merah menyala.	Jika kalian berkendara dan melintasi perempatan jalan, pasti akan mendapati lampu lalu lintas. Saat lampu merah menyala, itu artinya kendaraan harus berhenti. Karena, pada saat yang sama menyala lampu hijau pada ruas jalan lainnya.

		Bayangkan jika kalian menyerobot lampu merah, besar kemungkinan kalian akan bertabrakan dengan kendaraan dari ruas jalan lainnya yang sedang menyala lampu hijau. Karena itu, penting sekali kalian mematuhi rambu lampu lalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan. Karena itu, mematuhi lampu lalu lintas saat berkendara merupakan salah satu bentuk kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum serta pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
2.	Membuang sampah pada tempatnya.	Di sekolah kalian pasti ada tempat sampah. Bahkan bisa jadi sudah ada pemisahan tempat sampah <i>organic</i> dan <i>unorganic</i>. Adanya tempat sampah bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah. Renungkan jika kalian sembarangan membuang sampah di lingkungan sekolah, bisa berakibat lingkungan sekolah menjadi kotor dan berbagai kuman penyebab penyakit mudah menjangkiti kalian. Dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kalian telah menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah. Menjaga kebersihan dan kesehatan merupakan bentuk kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum.

3.	Menyeberang jalan pada zebra cross atau jembatan penyeberangan.	Jika kalian hendak menyeberang jalan raya, carilah zebra cross atau jembatan penyeberangan. Selain bentuk mematuhi peraturan lalu lintas, juga untuk menjaga keselamatan kalian sendiri. Laju kendaraan di jalan raya berkecepatan relatif tinggi. Sehingga, sulit bagi pengemudi kendaraan untuk mengerem mendadak jika kalian sembarangan menyeberang jalan. Karena itu, patuhilah aturan lalu lintas dengan menyeberang jalan di zebra cross atau jembatan penyeberangan. Dengan begitu, kalian telah mematuhi peraturan dan perilaku tersebut merupakan bentuk pengamalan sila keempat Pancasila.
4.	Menghormati dan menghargai harkat dan martabat sesama.	Dalam interaksi bersama teman-teman di sekolah, kalian wajib memperlakukan mereka sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia. Kalian tidak boleh mengejek, menjelek-jelekan, mengintimidasi, dan mengucilkannya dalam pergaulan sehari-hari di sekolah. Kalian harus berteman dengan baik. Saling menghormati dan menjaga kehormatan teman kalian.

		Dengan demikian, kalian telah mematuhi norma di lingkungan sekolah dan mempraktikkan pengamalan sila kedua Pancasila dalam kehidupan.
5.	Membantu meringankan kesulitan ekonomi tetangga.	Dalam kehidupan sehari-hari, tetangga adalah keluarga terdekat kalian. Jika terjadi sesuatu dengan kalian, pasti tetangga yang akan pertama kali membantu. Misalnya, orangtua kalian sakit dan harus dibawa ke rumah sakit saat itu juga, maka yang pertama kali membantu pasti tetangga. Karena itu, jika ada tetangga yang mengalami kesulitan ekonomi, maka bantulah semampu kalian. Bisa dengan berbagi makanan atau berbagi uang jajan sekolah kalian dengan anak tetanggamu yang tidak diberikan uang jajan. Bisa jadi bagi kalian uang jajan Rp 5.000 itu kecil, tapi bagi teman kalian yang orangtuanya sedang kesulitan ekonomi, uang tersebut bernilai besar. Membantu tetangga yang kesulitan ekonomi merupakan bentuk menjalankan norma sosial di masyarakat. Ini juga merupakan praktik pengamalan sila kelima Pancasila.

kepatuhan terhadap hukum dan norma dalam kehidupan sehari-hari di atas, sekarang coba kalian tuliskan lima contoh sikap patuh terhadap hukum dan norma di lingkungan sekolah sebagai bentuk pengamalan Pancasila. Kemudian, kalian ceritakan di depan kelas secara bergantian.

No.	Perilaku patuh hukum dan norma	Penjelasan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum perlu ditanamkan sejak dini. Internalisasinya berawal dari lingkungan keluarga. Setiap anggota keluarga hendaknya memahami hak dan kewajibannya di dalam keluarga. Mereka harus saling menghormati hak anggota keluarga lainnya dan menjalankan kewajiban sebelum menuntut haknya. Apabila hal ini dapat diwujudkan, setiap anggota keluarga akan terbiasa menerapkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat dan negara.

Sebagai pelajar, kalian juga harus mempunyai kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum. Sikap patuh terhadap hukum bukan hanya untuk kebaikan bersama, melainkan untuk kebaikan diri kalian juga. Kalian akan terbiasa berdisiplin dengan berbagai aturan dan hukum. Sikap disiplin sangat bermanfaat bagi kalian dalam menempuh studi dan berjuang mewujudkan cita-cita di masa depan.

Contoh sikap kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dalam kehidupan sosial bagi seorang pelajar, di antaranya disiplin menggunakan media sosial secara baik dan bertanggung jawab. Manfaatkan media sosial untuk menebar konten bermanfaat bagi para pelajar lainnya. Misalnya, konten motivasi dan strategi belajar bahasa asing, kiat menulis karya ilmiah, dan pengalaman menarik berorganisasi di sekolah.



Gambar 3.2 Menggunakan media sosial secara baik dan bertanggung jawab merupakan sikap patuh terhadap hukum.

Sumber: Kemdikbud/www.ditsmp.kemdikbud.go.id (2021)

Hindari menggunakan media sosial untuk menyebarkan berita bohong (*hoax*) dan menghujat orang lain. Perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan serta menghujat orang lain adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, sebagai pelajar yang baik, kembangkanlah sikap kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila.



Penyajian Materi

A. Pancasila sebagai Dasar Negara

Secara historis, pemikiran Pancasila sebagai dasar negara bisa ditelusuri dari pidato Sukarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Pada pidato tersebut Sukarno menyatakan, dasar negara dalam bahasa Belanda, disebut *filosofische grondslag*. Artinya, fundamen, filsafat, jiwa, pikiran, dan hasrat sedalam-dalamnya yang di atasnya didirikan Negara Indonesia merdeka.

Pada kesempatan itu, Sukarno menyampaikan lima dasar bagi Negara Indonesia merdeka yang dinamakan Pancasila. “Panca” artinya lima dan “sila” artinya azas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah didirikan Negara Indonesia. Momen pidato Sukarno pada 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara dicantumkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945. UUD NRI 1945 disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Secara legal formal, Pancasila sebagai dasar negara termaktub jelas dalam Pembukaan UUD NRI 1945 pada alinea keempat.

“...maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Mengacu pada kalimat “...negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada...” menegaskan bahwa dasar Negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mengandung konsekuensi bahwa setiap aspek penyelenggaraan negara harus mengacu dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mulai dari penyelenggaraan pada lingkup pemerintah pusat sampai pemerintah daerah yang terkecil.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan pengertian bahwa dalam menyelenggarakan negara mesti didasarkan pada nilai Ketuhanan. Maka, pada pasal 29 ayat 1 UUD NRI 1945 ditegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, negara berkewajiban membuat kebijakan-kebijakan yang selaras dengan nilai-nilai Ketuhanan. Negara juga berkewajiban membina rakyatnya agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan makna dalam menyelenggarakan negara mesti menghormati nilai kemanusiaan dengan memposisikan manusia secara adil dan beradab sesuai harkat dan martabatnya. Misalnya, pemerintah melaksanakan program pembangunan dengan melibatkan rakyat sebagai subjek pembangunan.

Sila Persatuan Indonesia memberikan makna bahwa dalam menyelenggarakan negara mesti menjaga nilai persatuan bangsa. Artinya, pemerintah harus memastikan kebijakan-kebijakan negara harus mengarah pada upaya menjaga keutuhan dan kesatuan Negara Indonesia.



Gambar 3.3 Negara Kesatuan Republik Indonesia harus kita jaga keutuhannya.

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan memberikan makna bahwa dalam menyelenggarakan negara mesti mendahulukan nilai musyawarah untuk mufakat. Artinya, proses pengambilan kebijakan-kebijakan negara diputuskan dengan memperhatikan nilai-nilai musyawarah untuk mufakat.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan makna bahwa dalam menyelenggarakan negara mesti mengutamakan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, negara harus berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan dicantumkannya Pancasila sebagai dasar negara dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, maka dapat dimaknai Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menjadi penghubung antara Pancasila dengan aturan dasar yang terkandung dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945.

Rumusan Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 secara yuridis konstitusional (Hukum dan Perundangan) berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang memuat Pancasila sebagai dasar negara merupakan norma fundamental negara yang tidak bisa diubah.

Kalian sekarang menjadi paham kan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara? Nah, kalian bisa mempraktikannya melalui sikap taat terhadap peraturan dan tata tertib sekolah. Misalnya, saat pengambilan keputusan dalam lingkup Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), lakukanlah secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal ini merupakan bentuk pengamalan sila keempat Pancasila.

Nah, agar kalian lebih dapat menghayati pengamalan nilai-nilai Pancasila, buatlah kelas menjadi beberapa kelompok. Lakukanlah pengamatan dan wawancara ke masyarakat untuk mengetahui persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat terkait pengamalan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, diskusikan dalam kelompok untuk memecahkan persoalan yang kalian temukan.

Misalnya, kalian mendapati kesenjangan sosial yang cukup lebar pada sebuah masyarakat dalam satuan rukun tetangga. Ada warga yang sangat miskin, namun sisi lain tidak sedikit warga yang kaya. Namun, sayangnya warga yang sangat miskin tersebut kurang mendapat perhatian dari para warga.

Coba kalian diskusikan bersama kelompokmu, fakta sosial tersebut terkait dengan Pancasila sila ke berapa? Kemudian, rumuskan solusi pemecahan atas masalah sosial tersebut dan presentasikan di depan kelas.

B. Pancasila sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Negara

Sekolah kalian pasti memiliki aturan dan hukum yang menjadi acuan untuk mewujudkan ketertiban kehidupan di lingkungan sekolah. Ketika tiada aturan dan hukum di sekolah, maka kehidupan di sekolah akan kacau dan berantakan. Bisa kalian bayangkan apa jadinya bila warga sekolah hidup dalam lingkungan sekolah yang tidak memiliki aturan dan hukum.



Gambar 3.4 Sosialisasi peraturan dan tata tertib sekolah menjadi penting agar terwujud sikap patuh terhadap hukum dan norma.

Sumber: SMPN 9 Batam/www.smpn9batam.sch.id/ (2022)

Demikian pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum yang

mengatur tata kelola berbangsa dan bernegara serta menjadi acuan dalam merumuskan aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Secara yuridis-normatif (hukum normatif), Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan *staatsfundamentálnorm* (norma hukum tertinggi negara). Hal ini karena memuat norma-norma fundamental negara yang didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. *Staatsfundamentálnorm* berkedudukan lebih tinggi daripada *staatsverfassung* (konstitusi negara) yang terumuskan dalam pasal-pasal UUD NRI 1945.

Dengan demikian, pasal-pasal UUD NRI 1945 merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila. Karena itu, nilai-nilai Pancasila berdiri di atas kedudukan sebagai *staatsfundamentálnorm*. Kedudukan Pancasila secara yuridis berada di atas hukum positif.

Oleh karena itulah, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Kemudian, pada pasal 3 disebutkan UUD NRI 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.

Sebagai hukum dasar tertinggi negara, UUD NRI 1945 harus menjadi pedoman dalam penyusunan setiap peraturan perundang-undangan. Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI 1945 menyebutkan, Negara Indonesia adalah negara hukum.

Adapun hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Oleh karena itu, setiap produk hukum yang dihasilkan negara tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar Pancasila. Setiap sila dalam Pancasila merupakan nilai dasar atau prinsip, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. Karenanya, dalam merumuskan hukum dan peraturan negara mesti bernapaskan pada sila-sila dalam Pancasila.



Gambar 3.5 Setiap produk hukum yang dihasilkan Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar Pancasila.

Sumber: Kompas.com/Tsarina Maharani/www.nasional.kompas.com (2020)

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa harus menjadi acuan dalam merumuskan hukum dan peraturan negara yang berhubungan dengan kehidupan beragama dan penganut kepercayaan. Melalui perangkat hukum, negara harus mengarahkan warganya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taat menjalankan ajaran agamanya. Saling menghormati antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan.

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mesti menjadi acuan dalam merumuskan hukum dan peraturan yang melindungi harkat dan martabat kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak boleh ada tebang pilih dalam pelaksanaan hukum. Setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum dan memperoleh perlakuan yang sama.

Sila persatuan Indonesia mesti menjadi arah kebijakan hukum untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak boleh ada kebijakan hukum yang berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa.

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mesti menjadi acuan dalam merumuskan hukum dan peraturan tentang mekanisme implementasi kedaulatan rakyat. Negara harus mampu mengarahkan warganya untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelenggaraan bernegara dan kehidupan berbangsa.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mesti menjadi acuan dalam merumuskan hukum dan peraturan guna mewujudkan kesejahteraan sosial yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh ada perangkat hukum yang menguntungkan sebagian golongan dan mengorbankan kepentingan rakyat.

Jadi, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara bermakna Pancasila menjadi rujukan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sebagai contoh

dalam bidang pendidikan, maka disusunlah tujuan pendidikan nasional, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 3 tertulis, “Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia...”.

Kedudukan undang-undang di bawah Pancasila dan UUD NRI 1945, itulah mengapa perumusan Undang-undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengacu pada Pancasila dan UUD NRI 1945. Sila pertama Pancasila berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila menjadi acuan dalam perumusan tujuan pendidikan nasional.

Itulah alasannya tujuan pendidikan nasional diarahkan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia...”. Frasa “Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia” jelas menunjukkan bentuk penerjemahan dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, tujuan pendidikan nasional menjadi senapas dan seirama dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.



Refleksi

Setelah kalian mempelajari Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum negara, cobalah kalian identifikasi perilakumu sehari-hari di lingkungan sekolah dan masyarakat apakah sudah menunjukkan sikap sadar dan patuh terhadap hukum dan norma yang berlaku di sekolah dan masyarakat sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan mengisi kolom perbandingan berikut ini.

No.	Hukum atau Norma	Perilaku Realita	Rencana Perbaikan
A. Di lingkungan sekolah			
1.	Jujur dalam pelaksanaan ujian sekolah.	Sesekali masih suka lirik-lirik lembar jawaban teman untuk menyontek jawaban.	Mem persiapkan diri menjalani ujian sekolah dengan baik dan bersikap jujur dalam pelaksanaan ujian tersebut.
2.			
3.			
4.			
5.			
B. Di lingkungan masyarakat			
1.	Berkata santun kepada orang yang lebih tua.	Sesekali masih menggunakan bahasa yang kurang santun dalam berkomunikasi dengan orang yang lebih tua.	Belajar menggunakan bahasa yang santun dalam berkomunikasi dengan orang yang lebih tua.
2.			
3.			
4.			
5.			



Asesmen

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban dan analisis yang tepat!

1. Jelaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber segala sumber hukum negara!
2. Jelaskan hubungan Pancasila dengan Pembukaan dan Pasal-pasal Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945!
3. Mengapa nilai-nilai Pancasila berada di atas hukum positif? Jelaskan!
4. Jelaskan tiga contoh sikap sadar hukum di lingkungan sekolah dan masyarakat!
5. Jelaskan tiga contoh peraturan perundang-undangan yang dijiwai oleh Pancasila!

Bab IV

Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa



Capaian Kompetensi

Setelah membaca dan memahami materi serta melakukan kegiatan yang terdapat dalam Bab IV:

1. Peserta didik dapat menguraikan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
2. Peserta didik dapat menjelaskan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia yang mencerminkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
3. Peserta didik dapat menganalisis persoalan di masyarakat dan merumuskan solusinya berlandaskan kepada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
4. Peserta Didik dapat menampilkan perilaku implementasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari.



Pengantar Materi

Kalian patut bersyukur sudah menyelesaikan materi pembahasan Pancasila sebagai dasar negara. Semoga kalian juga bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bentuk sikap sadar dan patuh terhadap hukum yang berlaku di masyarakat.

Pada bab ini kalian akan mempelajari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kalian pasti memiliki nilai-nilai dalam diri yang menjadi acuan ketika bergaul, baik dalam kehidupan di sekolah maupun di masyarakat. Nilai-nilai itu terbentuk dari serangkaian proses belajar dan pengalaman hidup yang kalian jalani sampai saat ini. Lalu, nilai-nilai itu membentuk pandangan hidup.

Demikianlah gambaran Pancasila bagi Bangsa Indonesia. Pancasila merupakan kristalisasi dari pengalaman hidup dalam sejarah panjang Bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam perilaku dan membentuk karakter, perilaku, etika, tata nilai, dan norma Bangsa Indonesia yang menjadi pandangan hidup bangsa.

Pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian dari nilai-nilai luhur. Artinya, Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dan luhur Bangsa Indonesia yang menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketika ada permasalahan dalam kehidupan, sejak dahulu Bangsa Indonesia terbiasa mengacu pada nilai-nilai luhur yang menjadi pandangan hidup untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Misalnya, dalam memutuskan suatu persoalan, Bangsa Indonesia telah terbiasa mempraktikkan musyawarah untuk mencapai mufakat.



Gambar 4.1 Musyawarah merupakan salah satu nilai luhur Bangsa Indonesia.
Sumber: Pemda Trenggalek/Widianingrum Hamid Putri/www.duren-tugu.trenggalekkab.go.id (2020)

Nah, bagaimana makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Mari kita kaji bersama. Namun, sebelumnya kalian mesti belajar tentang praktik pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebagaimana ditulis di bawah ini ya.



Praktik Pengamalan Pancasila

Sejak dahulu Bangsa Indonesia telah mempraktikkan nilai-nilai luhur yang menjadi pandangan hidup yang kemudian terkristalisasi menjadi Pancasila. Karena itu, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mesti kalian terjemahkan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat.

Sebagai generasi muda, kalian tidak boleh terpengaruh dengan berbagai pandangan hidup yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, permisivisme dan hedonisme. Permisivisme adalah pandangan hidup serba boleh, tidak peduli baik dan buruk. Sementara, hedonisme adalah pandangan hidup mempertunjukkan kemewahan asal senang dan nikmat.

Permisivisme dan hedonisme bertentangan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup. Karena itu, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mesti ditampilkan dalam kehidupan sebagai contoh perilaku kebaikan. Berikut ini adalah perilaku implementasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari.

No.	Nilai Pancasila	Contoh Perilaku
1.	Nilai Ketuhanan	Sejak dahulu Bangsa Indonesia sudah mempraktikkan sifat jujur sebagai bentuk pengamalan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan memerintahkan kita untuk bersikap jujur, baik perkataan maupun perbuatan. Karena itu, kalian mesti mampu menampilkan sikap jujur dalam aktivitas sehari-hari. Mulailah dari hal-hal sederhana, misalnya jujur saat mengerjakan ulangan harian atau tes formatif. Mungkin saja gurumu tidak tahu jika kalian menyontek, namun yakinlah bahwa Tuhan Maha Mengetahui dengan perbuatan kalian.

		Ketika kalian sudah terbiasa bersikap jujur dalam hal-hal sederhana, maka kalian akan mampu bersikap jujur dalam hal-hal besar. Misalnya, ketika kelak kalian sudah menjadi pejabat publik, maka kalian tidak akan goyah disuap atau tergoda untuk berbuat korupsi. Karena suap dan korupsi adalah bentuk ketidakjujuran.
2.	Nilai Kemanusiaan	Sejak dahulu Bangsa Indonesia sudah mempraktikkan sikap menjamu tamu dengan baik sebagai penghargaan terhadap harkat kemanusiaan. Mereka memandang tamu adalah orang yang harus dihormati dan diberikan pelayanan yang baik. Kita menemukan tradisi ini diberbagai daerah di Indonesia. Karena itu, kalian juga harus menjamu teman-teman kalian yang berkunjung ke rumah dengan baik. Misalnya, saat ada tugas belajar kelompok, Kalian bertindak sebagai tuan rumah, maka, jumlah teman-teman kalian dengan baik. Tidak harus dengan makanan yang enak dan mahal, melainkan dengan minuman dan makanan sederhana juga termasuk bentuk menghormati tamu. Dalam konteks yang lebih besar, ketika kelak kalian menjadi seorang pejabat publik, kalian terbiasa menunjukkan sikap menjamu tamu-tamu kenegaraan dengan baik.

3.	Nilai Persatuan	Bangsa Indonesia sejak dahulu telah mempraktikkan sikap gotong royong dalam aktivitas kehidupan sebagai bentuk kebersamaan dan persatuan. Itulah mengapa di daerah ada peribahasa, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Selain itu, Bangsa Indonesia juga terbiasa mengedepankan semangat persatuan dan mengesampingkan perbedaan. Lihatlah peristiwa lahirnya Sumpah Pemuda. Para pemuda dari berbagai latar belakang suku, agama, bahasa, dan budaya bersatu mendeklarasikan Sumpah Pemuda. Karena itu, kalian bisa mempraktikkan nilai persatuan ini dalam aktivitas di sekolah dan masyarakat. Misalnya, kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Pengurus OSIS bisa mengkoordinir para siswa untuk menyukseskan kegiatan ini.
4.	Nilai Kerakyatan	Bangsa Indonesia sejak dahulu telah mempraktikkan prinsip musyawarah untuk mufakat dalam memutuskan berbagai persoalan. Misalnya, dalam suksesi kepemimpinan di masyarakat dilakukan dengan musyawarah. Karena itu, kalian juga mesti mempraktikkan nilai musyawarah dalam aktivitas di sekolah. Misalnya, dalam pemilihan Ketua OSIS dan jajarannya, lakukanlah dengan cara bermusyawarah.

		Jika kelak kalian menjadi seorang anggota DPR, maka kalian sudah terbiasa menjadikan musyawarah sebagai cara pengambilan keputusan.
5.	Nilai Keadilan	Bangsa Indonesia sejak dahulu telah mempraktikkan sikap berbagi kepada sesama. Bangsa ini adalah bangsa yang mudah berempati terhadap kesulitan orang lain. Mereka tidak sungkan menyisihkan sebagian miliknya untuk diberikan kepada sesamanya yang membutuhkan. Karena itu, kalian juga mesti mempraktikkan sikap berbagi terhadap saudara kita yang membutuhkan. Mulailah dengan cara menyisihkan sebagian uang jajan kalian. Ajak teman-teman kalian juga melakukan hal yang sama. Kemudian, setelah beberapa waktu, kumpulkan. Kalian belanjakan alat tulis dan sekolah. Setelah itu, kalian bisa bagikan kepada teman-teman yang tidak mampu.

Dengan mempraktikkan contoh-contoh di atas, berarti kalian telah mengimplementasikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap serta bertindak. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa, maka nilai-nilai Pancasila diwujudkan ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.



Gambar 4.2 Membantu oranglain yang kesusahan merupakan bentuk pengamalan Pancasila.

Sumber: Kemekeu/Wulandari/www.djkn.kemenkeu.go.id (2020)

Selanjutnya, coba kalian bentuk kelompok dan lakukan pengamatan di lingkungan sekolah dan masyarakat tempat kalian tinggal. Apakah kalian menemukan praktik pengamalan yang mencerminkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Buatlah tulisan reportase atas pengamatan yang kalian lakukan dengan pendekatan 5 W 1 H (*what, why, who, where, when, and how*).

Maksudnya, *what*, apa bentuk praktik pengamalannya? *Who*, siapa yang melakukan praktik pengamalan tersebut? *Why*, mengapa mereka melakukan praktik pengamalan tersebut? *Where*, di mana praktik pengamalan tersebut dilakukan? *When*, kapan terjadinya? *How*, bagaimana mereka melakukan praktik pengamalan tersebut?

Presentasikan dan diskusikan hasil reportase tersebut di depan kelas bersama kelompok-kelompok lainnya dengan bimbingan bapak atau ibu guru. Kalian boleh saling menanggapi presentasi kelompok lain.



Penyajian Materi

A. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Pada pidato 1 Juni 1945 Sukarno menyebutkan Pancasila sebagai *Weltanschauung*. *Weltanschauung* berasal dari Bahasa Jerman yang terdiri dari kata *welt* yang berarti dunia dan *anschauung* yang berarti padangan atau persepsi. *Weltanschauung* dapat dimaknai sebagai sekumpulan nilai-nilai luhur yang menjadi orientasi atau panduan untuk memahami dan menjalani kehidupan.

Pancasila merupakan lima nilai filosofis mendasar yang digunakan untuk memandang dan memaknai kehidupan dunia. Sejak dahulu bangsa Indonesia memandang dan memaknai kehidupan dunia dengan menggunakan lima nilai filosofis Pancasila. Karena itulah, Pancasila disebut sebagai pandangan hidup bangsa.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dan luhur Bangsa Indonesia yang menjadi acuan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap maupun bertindak. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Noor MS. Bakry, dalam bukunya Pendidikan Pancasila, menyebutkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan diyakini kebenarannya, kebajikannya, keindahannya, kegunaannya oleh bangsa Indonesia dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengharuskan bangsa Indonesia untuk mentransformasikan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam bentuk penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Nilai ketuhanan menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang religius. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka, pandangan hidup ini mewarnai berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Misalnya, bangsa Indonesia menampilkan sikap sopan dan santun dalam perbuatan maupun perkataan. Perilaku sopan dan santun merupakan ajaran agama yang diamalkan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari serta cerminan akhlak mulia yang menjadi kepribadian bangsa Indonesia.

Karena itu, praktikkan dan tampilkanlah sikap sopan dan santun dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Terutama kepada orangtua, guru, dan orang yang lebih tua dari kalian. Setiap orang akan suka terhadap pelajar yang menampilkan perilaku sopan dan santun.



Gambar 4.3 Sikap sopan dan tutur kata santun merupakan nilai luhur Bangsa Indonesia.

Sumber: SMKN 1 Gombong/Hafid Masruri/www.smkn1gombong.sch.id (2019)

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang menghargai harkat martabat kemanusiaan. Karena itu, bangsa Indonesia menentang dan melakukan perlawanan di berbagai daerah pada masa penjajahan Belanda dan Jepang dulu.

Bangsa Indonesia juga menolak segala bentuk penjajahan di atas muka bumi. Hal ini tegas disebutkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) alinea pertama.

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Karena itu, kalian juga harus mampu menjaga dan menghormati harkat martabat teman-teman di sekolah. Tidak boleh melakukan perbuatan yang merendahkan martabat teman, seperti bullying.

Bisa jadi teman yang dibully itu lebih baik. Kalian nanti akan malu sendiri. Maka dari itu, tunjukkanlah sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama.

Nilai persatuan menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang mencintai persatuan. Kalian bisa memetik pelajaran dari perjalanan Sumpah Pemuda. Ketika itu, para pemuda terhimpun dalam berbagai organisasi kepemudaan sesuai latar belakang daerah masing-masing. Ada Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Batak, Jong Islamieten Bond, Jong Celebes, Jong Ambon, dan Jong Minahasa. Jika diibaratkan, organisasi-organisasi kepemudaan itu seperti batang-batang lidi yang terserak. Tidak memiliki kekuatan dan mudah dipatahkan jika masih terpisah-pisah.

Hal inilah yang disadari oleh para pemuda ketika itu. Belajar dari perjuangan bangsa Indonesia generasi sebelumnya yang bersifat kedaerahan, maka mudah dipatahkan oleh penjajah Belanda. Karena itulah, para pemuda menggagas perlunya persatuan pergerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Nilai persatuan inilah yang terus dikampanyekan dan ditanamkan kepada setiap pemuda. Meski berbeda agama, suku, bahasa, dan latar belakang organisasi, mereka bersepakat untuk mempersatukan diri sebagai pemuda Indonesia. Nilai persatuan inilah yang mengikat dan membingkai pandangan para pemuda ketika itu. Hingga akhirnya Sumpah Pemuda pun dideklarasikan sebagai simbol persatuan para pemuda Indonesia. Mereka berhimpun dalam satu barisan perjuangan memerdekakan Indonesia dari penjajahan.

Selain itu, kalian juga bisa belajar dari peristiwa menjelang pengesahan Piagam Jakarta. Ketika itu, ada keberatan dari masyarakat di Indonesia bagian Timur terhadap sila pertama Pancasila yang termuat dalam Piagam Jakarta sebagaimana dilaporkan oleh seorang opsir Jepang bernama Nijizima. Nijizima

melaporkan keresahan yang dialami oleh masyarakat di Indonesia Timur dan mengancam akan memisahkan diri jika kalimat berbunyi, Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya tidak diubah.

Menanggapi laporan tersebut, Bung Hatta menjelaskan kalimat tersebut sudah disetujui oleh orang-orang non-Islam, seperti Mr. A.A. Maramis. Namun, Nijizima tetap khawatir kalau persatuan yang telah dibina akan mengalami kehancuran.

Akhirnya, Sukarno dan Hatta, sebagai ketua dan wakil ketua PPKI, meminta K.H. Wahid Hasjim, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Teuku Mohammad Hassan, dan Mr. Kasman Singodimejo membicarakan rancangan Pembukaan UUD, khususnya kalimat, "...kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".

Sukarno dan Hatta melakukan pendekatan terhadap Teuku Mohammad Hassan agar membujuk Ki Bagus Hadikusumo, pemimpin Muhammadiyah dari Yogyakarta, yang paling keras mendukung dipertahankannya tujuh kata di atas dalam pembukaan UUD Tahun 1945. Teuku Mohammad Hassan berhasil melunakkan sikap Ki Bagus Hadikusumo. Dalam argumentasinya, Hassan menekankan pentingnya menjaga persatuan nasional. Rapat para tokoh Islam yang dipimpin oleh Hatta hanya berlangsung selama lima belas menit dengan kesepakatan penting.

Sila pertama Pancasila yang semula, Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Peristiwa tersebut menjadi bukti nyata jiwa besar para pemimpin bangsa dari kalangan Islam. Mereka dengan lapang hati bersedia mengubah rumusan sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta demi menjaga persatuan bangsa.

Kalian juga mesti menampilkan pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan sekolah dan masyarakat. Misalnya, menghormati teman-teman di sekolah dengan berbagai latar belakang agama, kepercayaan, suku, bahasa, dan budaya yang beragam. kalian harus menjaga situasi harmoni. dalam keragaman di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Nilai kerakyatan dan permusyawaratan menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang mengutamakan musyawarah mufakat untuk memecahkan persoalan. Hal ini bisa dilihat dari tradisi musyawarah yang sudah mengakar di masyarakat nusantara. Misalnya, pada tingkat desa kita mengenal rembuk desa yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan desa untuk membahas berbagai persoalan demi kemajuan desa.

Kalian juga harus mampu mengamalkan sila keempat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan sekolah. Misalnya, kalian selalu mengedepankan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan organisasi di sekolah. Setiap anggota dihormati dan diberikan hak untuk menyampaikan pendapatnya. Sampai pada titik akhir menyepakati satu pandangan dan menjadikannya sebagai keputusan organisasi.

Nilai keadilan sosial menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang dermawan dan gemar berbagi. Mereka hidup guyub dalam tradisi gotong-royong. Membantu warga masyarakat yang kesusahan sudah menjadi pandangan hidup yang mewarnai kehidupan bangsa. Distribusi kesejahteraan sosial secara adil telah lama menjadi nilai dan pandangan hidup Bangsa Indonesia.



Gambar 4.4 Gotong royong merupakan bentuk pengamalan sila kelima Pancasila.

Sumber: Antara/Muhammad Hamzah/www. sulteng.antaranews.com (2021)

Kalian juga bisa mengamalkannya dengan menunjukkan sikap saling membantu sesama teman. Jika ada teman yang sedang mengalami kesusahan, misal. rumahnya terdampak banjir, maka kalian bisa menunjukkan sikap solidaritas kepadanya dengan cara mengajak teman-teman untuk menyisihkan uang jajan dan mengumpulkannya, kemudian diberikan kepada teman yang sedang mengalami kesusahan.

B. Pancasila sebagai Kristalisasi Nilai-nilai Luhur Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebenarnya merupakan perwujudan dan kristalisasi nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia yang sudah ada, tumbuh, dan berkembang berabad-abad lamanya yang diyakini kebaikan dan kebenarannya.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan karakteristik bangsa Indonesia. Pancasila merangkum nilai-nilai luhur agama dan budi pekerti bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memiliki nilai-nilai luhur yang membedakan antara bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu cerminan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai tersebut telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan Bangsa Indonesia.

Sebagai contoh, jika kalian mengikuti pertukaran pelajar internasional, maka akan terjadi interaksi dengan para pelajar dari berbagai negara di penjuru dunia. Kalian akan mendapati keragaman agama, kepercayaan, budaya, bahasa, dan ras. Dalam hal ini, mesti mampu menunjukkan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional.

Pelajar yang cerdas jangan mudah terpengaruh untuk ikut-ikutan budaya negara lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila meskipun populer, semisal K-pop.

Dalam konteks ini, kalian mesti ingat sila pertama Pancasila mengajarkan tentang Ketuhanan dan religiusitas. Pancasila, yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia, mesti diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi jati diri Bangsa Indonesia. Sejak dahulu masyarakat nusantara sudah mempraktikkan nilai-nilai luhur tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sifat-sifat-Nya yang Maha Sempurna, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Bangsa Indonesia juga bersikap toleran dan menghormati antar pemeluk

agama dan kepercayaan. Nilai-nilai luhur inilah yang kemudian terkristalisasi dalam sila pertama Pancasila.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengakui harkat martabat manusia dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Bangsa Indonesia juga memperlakukan manusia dengan adil sebagai makhluk ciptaan Tuhan serta mengembangkan sikap tenggang rasa dan tidak berbuat semena-mena kepada orang lain. Nilai-nilai luhur inilah yang kemudian terkristalisasi dalam sila kedua Pancasila.



Gambar 4.5 Menghormati dan menghargai sesama teman merupakan bentuk pengamalan Pancasila.

Sumber: Antara/Ahmad Subaidi/www.metro.tempo.co (2020)

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang cinta tanah air dan rela berkorban demi kepentingan bangsa, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Bangsa Indonesia juga mengakui keberagaman suku bangsa dan budaya, sekaligus mendorong ke arah persatuan dan kesatuan. Inilah yang terkristalisasi dalam sila ketiga Pancasila.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menjadikan musyawarah sebagai jalan dalam mencapai mufakat untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan. Bangsa Indonesia juga memandang manusia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Nilai-nilai luhur inilah yang terkristalisasi dalam sila keempat Pancasila.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang gemar menolong satu sama lain dan mengembangkan sikap kekeluargaan serta kegotong-royongan. Bangsa Indonesia juga memiliki pemikiran dan perilaku untuk mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Nilai-nilai luhur inilah yang terkristalisasi dalam sila kelima Pancasila.

Bangsa Indonesia memiliki watak, karakter, dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Watak dan karakter ini membentuk kepribadian Bangsa Indonesia yang membedakannya dengan kepribadian bangsa-bangsa lain. Dengan demikian, Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur dan kepribadian Bangsa Indonesia.

C. Pancasila sebagai Solusi Persoalan Kehidupan

Setiap bangsa di dunia yang ingin berdiri kokoh dan memahami dengan jelas orientasi dan tujuan berbangsa memerlukan pandangan hidup. Dengan pandangan hidup inilah, suatu bangsa akan mampu memandang persoalan yang dihadapinya dengan jernih, sehingga dapat memecahkannya secara tepat. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan terombang-ambing dalam menghadapi berbagai persoalan, baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan dunia.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa bisa kita gunakan sebagai cara pandang dalam merespon berbagai persoalan kehidupan. Sebagai contoh, di era digital ini, persebaran informasi di dunia maya begitu masif. Kita seperti banjir informasi.

Namun, sayangnya terkadang di sinilah muncul persoalan, yaitu tersebar informasi bohong dan ujaran kebencian di dunia maya, khususnya di media sosial. Hal ini bisa menimbulkan dampak negatif, seperti permusuhan yang bisa berujung pada pengaduan hukum ke kepolisian.

Kalian mungkin pernah membaca berita seseorang yang dilaporkan kepada kepolisian karena postingannya di media sosial. Postingan tersebut dinilai oleh pihak yang terkait sebagai pencemaran nama baik perusahaan. Akibatnya, penulis postingan tersebut harus berurusan dengan kepolisian.

Sebaliknya, ketika teknologi informasi, termasuk media sosial, dimanfaatkan untuk hal-hal positif, maka akan menimbulkan dampak positif. Misalnya, kalian menulis di media sosial tentang serial perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kemudian, tulisan kalian memantik semangat para pelajar yang membacanya untuk juga berkontribusi bagi bangsa dan negara.

Setelah kalian memahami teknologi informasi, termasuk media sosial, bisa menghadirkan dampak negatif dan positif, menurut kalian apa yang mesti dilakukan agar kehadiran teknologi informasi mendatangkan dampak positif bagi masyarakat dan bangsa? Kalian bisa mengacu pada nilai-nilai Pancasila untuk merumuskan solusinya. Tuliskan pendapat kalian dan sampaikan di depan kelas ya.

Dalam hal ini, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan etika literasi digital saat berselancar di dunia maya. Perlu kalian ketahui, pengguna internet hadir dengan berbagai macam latar belakang agama, suku, dan budaya. Pada sisi lain jumlah pengguna internet terus bertumbuh setiap tahunnya. Artinya, pengguna internet semakin beragam latar belakangnya.



Masalahnya, ketika konten informasi yang tersebar di dunia maya bermuatan negatif. Misalnya, ujaran kebencian, informasi bohong untuk memfitnah, dan konten negatif lainnya. Maka, hal ini sangat berbahaya dan mengancam kerukunan dalam kebinekaan. Nilai luhur bangsa Indonesia yang terbiasa hidup rukun dalam kebinekaan bisa terkikis. Karena itulah, sikap menjaga persatuan sebagai nilai Pancasila perlu dikedepankan dalam berselancar dan berinteraksi di dunia maya.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi jangan sampai digunakan untuk hal-hal tidak produktif. Justru kemajuan teknologi informasi dan komunikasi harus dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa. Inilah contoh menggunakan cara pandang Pancasila sebagai pandangan hidup untuk merespon persoalan kehidupan.

Contoh lain, pada sebuah rapat Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) di sekolah kalian terjadi silang pendapat cukup tajam antar pengurus OSIS untuk memutuskan tujuan kunjungan studi lapangan. Setiap pengurus OSIS mengemukakan argumentasi dan alasannya, namun tidak ada titik temu. Setiap pengurus OSIS merasa pandangannya lebih tepat. Terjadilah *deadlock* (kebuntuan).

Menyikapi persoalan ini bagaimana pendekatan yang kalian lakukan untuk menemukan solusinya? Kalian bisa merujuk kepada sila keempat Pancasila. Sila keempat mengajarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Dalam musyawarah berarti setiap pihak mesti menekan dan mengendalikan egonya. Gunakan pikiran jernih dan objektif untuk memandang persoalan. Dalam contoh persoalan di atas, buatlah indikator tempat tujuan kunjungan studi lapangan sebagai acuan. Kemudian, analisis setiap usulan tujuan kunjungan studi lapangan berdasarkan indikator tersebut.



Gambar 4.7 Musyawarah harus dilakukan dengan pikiran jernih agar bisa berpandangan objektif.

Sumber: Tribun Jogja/Noristera Pawestri/www. jogja.tribunnews.com (2018)

Dari berbagai usulan yang ada, kerucutkan menjadi tiga pilihan yang paling mendekati indikator. Kemudian, dianalisis lebih dalam lagi dan diputuskan satu tujuan kunjungan studi lapangan yang paling memenuhi indikator yang sudah ditetapkan. Akhirnya, diputuskan secara mufakat sebagai hasil akhir. Inilah contoh menggunakan cara pandang Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa dalam memecahkan persoalan dalam kehidupan.



Refleksi

Setelah kalian mempelajari materi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, cobalah identifikasi berbagai persoalan di sekolah dan di masyarakat, lalu rumuskan pemecahan solusinya berdasarkan cara pandang Pancasila. Perhatikan contoh di atas!

No.	Persoalan	Rumusan Solusi
1.	Terjadi kesenjangan sosial di masyarakat antara warga yang mampu dan tidak mampu. Ada beberapa warga yang hidup dalam kemiskinan akut.	Menginisiasi tabungan donasi kebaikan warga. Setiap warga memberikan donasi setiap bulan sesuai kemampuan. Donasi dihimpun dan dikelola oleh pengurus RT. Kemudian, pengurus RT menyalurkan donasi tersebut dalam bentuk bantuan sembako untuk warga yang terbelit kemiskinan, juga dalam bentuk modal kerja agar mereka bisa berproses menuju kemandirian. Hal ini merupakan cerminan pengamalan sila kelima Pancasila.
2.		
3.		
4.		
5.		



Asesmen

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan analisis yang tepat

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa!
2. Tulislah tiga contoh persoalan di sekolah dan rumuskan pemecahan solusinya berdasarkan cara pandang Pancasila sebagai pedoman hidup!
3. Jelaskan apa yang dimaksud Pancasila sebagai kristalisasi dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia!
4. Jelaskan lima nilai luhur bangsa Indonesia yang mencerminkan Pancasila sebagai pandangan hidup!
5. Tulislah lima contoh bentuk pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dan di masyarakat!

BAB V

Pancasila sebagai Ideologi Negara



Capaian Kompetensi

Setelah membaca dan memahami materi serta melakukan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Bab V:

1. Peserta didik dapat memberi argumentasi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia.
2. Peserta didik dapat menguraikan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia.
3. Peserta didik dapat mengaktualisasikan Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan sehari-hari.
4. Peserta didik dapat merancang kegiatan yang menunjukkan makna Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia.



Pengantar Materi

Selamat ya, kalian sudah memasuki bab V, bab terakhir dari buku SMP Kelas VII ini. Semoga kalian jadi lebih memahami tentang Pancasila dan terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada bab V ini kita akan belajar Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Apakah kalian pernah mendengar atau mengetahui yang dimaksud dengan ideologi, aspek atau dimensi sebuah ideologi, fungsi ideologi bagi suatu negara, dan pelaksanaan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia? Pada bab ini, kita akan belajar antara lain makna dari ideologi, aspek atau dimensi sebuah ideologi, fungsi ideologi bagi negara Indonesia, dan praktik pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara, serta bagaimana aktualisasi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

Seperti yang telah kalian pahami, Indonesia adalah negara dengan wilayah yang luas serta penduduk yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, adat istiadat, agama, dan lain sebagainya. Untuk mengelola dan mengatur negara dengan keanekaragamannya tersebut, sebagai salah satu sarana pemersatu masyarakat yang beragam tentu negara memerlukan ideologi yang sesuai bagi bangsanya. Di dunia ini terdapat berbagai macam ideologi, mungkin kalian pernah mendengar istilah liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekulerisme, atau ideologi yang didasarkan pada satu agama tertentu.

Negara Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 berdasarkan kesepakatan bersama para pendiri bangsa Indonesia, bukan negara yang berdasarkan pada ideologi liberalisme, komunisme, sekulerisme atau didasarkan pada salah satu

agama tertentu, tetapi Indonesia berdasarkan pada ideologi Pancasila dengan sila-silanya yakni 1) Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3) Persatuan Indonesia, 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dinilai sebagai ideologi yang paling sesuai bagi bangsa Indonesia dengan keanekaragamannya baik suku, agama, budaya, bahasa daerah, dan lain sebagainya.

Ideologi merupakan satu kumpulan nilai yang memandu negara dalam mengelola wilayah dan mengatur kehidupan masyarakatnya dalam mencapai cita-cita yang diharapkan. Ideologi menjadi arah dalam mengatasi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam mewujudkan pembangunan nasional yang dicita-citakan suatu bangsa. Pada titik inilah kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara sangat penting untuk kita pelajari dan implementasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Sebelum mempelajarinya lebih lanjut ideologi Pancasila, kalian terlebih dahulu akan diajak untuk menyimak sub bab praktik pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dan untuk memperluas serta memperdalam wawasan pada bab ini, maka disajikan juga pengantar materi terkait Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Berikutnya, untuk melatih bagaimana implementasi Pancasila sebagai ideologi negara, dan untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan kalian diminta untuk mengerjakan asesmen pada bagian akhir bab V.

Pemahaman kalian mengenai Pancasila sebagai ideologi negara agar lebih mantap dan kokoh, maka pada bab ini akan diuraikan beberapa praktik pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara,

salah satunya pembelajaran tentang pembangunan berwawasan lingkungan hidup berdasarkan ideologi Pancasila. Selain menjadi salah satu fokus utama negara saat ini, keberadaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup berdasarkan Pancasila juga dapat membuktikan bahwa Pancasila benar-benar menjadi ideologi yang mampu mengarahkan negara untuk mengatasi berbagai persoalan yang tengah dialami, termasuk kerusakan lingkungan hidup. Jika dikaitkan dengan cita-cita bangsa Indonesia, hal tersebut jelas dianggap sebagai persoalan besar yang harus diselesaikan oleh seluruh bangsa Indonesia, mengingat bagaimana mungkin masyarakat adil dan makmur dapat terwujud dengan baik jika lingkungan hidup yang menjadi bagian dari tanah air Indonesia rusak?



Praktik Pengamalan Pancasila

Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia haruslah dapat dipraktikkan dalam kehidupan di masyarakat, bangsa, dan negara. Praktik pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara dituntut dapat merespon dan menyesuaikan pelaksanaannya dengan berbagai tantangan dan perkembangan zaman yang terus berubah, disesuaikan dengan kebutuhan zamannya. Namun, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dasarnya yang terkandung dalam Pancasila. Sukarno menyebut Pancasila sebagai *leitstar* atau bintang penuntun yang bersifat dinamis untuk mengarahkan pergerakan bangsa dan negara Indonesia ke depan. Pancasila disebut juga sebagai ideologi terbuka, di mana dalam pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia.

Negara Indonesia yang berideologikan Pancasila, dalam praktik pelaksanaannya harus mendasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Negara

Indonesia yang berdasarkan pada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, ditunjukkan dengan negara Indonesia berlandaskan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia bukanlah negara atheis, bukan juga negara agama yang mendasarkan pada satu agama, dan bukan negara sekuler yang memisahkan urusan negara dengan agama, tetapi negara yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.



Gambar 5.1 Negara Indonesia mengakui dan menjamin tiap-tiap penduduk untuk beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing

Bangsa Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kalian sebagai pelajar tentu dituntut untuk percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan saling menghormati, toleran, dan dapat bekerja sama antarumat seagama, berbeda agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Coba kalian tuliskan contoh pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa pada tabel di bawah ini.

No.	Contoh Pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa
1.	Di Keluarga 1. 2.
2.	Di Sekolah 1. 2.
3.	Di Masyarakat 1. 2.

Sila kedua **Kemanusiaan yang adil dan beradab**, ditunjukkan dengan adanya pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia, menunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan menghormati hak-hak dasar manusia sebagai makhluk individu, sebagai warga negara, dan sebagai bagian dari masyarakat. Di

Indonesia terdapat pengakuan dan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia, seperti hak asasi untuk hidup, beragama, berusaha, mendapatkan pendidikan, dan sebagainya. Nilai-nilai kemanusiaan yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat sosial manusia sebagai satu hal penting, fundamen dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

Sukarno mengemukakan bahwa kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan *chauvinism*, melainkan kebangsaan yang menuju kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Sehingga kita sebagai pelajar yang mengamalkan Pancasila sebagai ideologi negara tentu harus bersikap dan bertindak untuk menghormati orang tua, guru, teman, atau orang lain, dapat menolong orang lain yang sedang kesulitan atau membutuhkan, tidak melakukan *bullying* atau menghina orang lain yang berbeda suku, agama, budaya, bahasa atau lainnya. Coba kalian sebagai pelajar kemukakan contoh cara menghormati dan menghargai orang tua di rumah, guru di sekolah, dan kawanmu di sekolah atau kelas, sebagai bentuk pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara. Tuliskan pada tabel di bawah ini!

No.	Contoh cara menghormati dan menghargai orang tua di rumah, guru di sekolah, dan kawan di kelas, sebagai bentuk pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara
1.	Menghormati dan menghargai orang tua di keluarga 1. 2.
2.	Menghormati dan menghargai guru di sekolah 1. 2.
3.	Menghormati dan menghargai teman di sekolah 1. 2.

Sila ketiga **Persatuan Indonesia**. Pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara dapat ditunjukkan dengan menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa serta negara Indonesia di atas kepentingan, pribadi atau golongan. Meskipun memiliki banyak keanekaragaman, tetapi tetap satu, Berbhineka Tunggal Ika dalam bingkai ideologi Pancasila. Negara Indonesia menerima dan memberi ruang hidup bagi setiap warga dengan berbagai perbedaan seperti agama dan keyakinan, adat istiadat, suku, atau budaya masing-masing. Kalian sebagai seorang pelajar yang mengamalkan Pancasila sebagai ideologi negara, maka dalam bersikap dan bertindak harus mengutamakan persatuan dan kesatuan, menghormati, dan menghargai orang lain yang berbeda agama, suku, adat istiadat atau budaya, sehingga diharapkan tidak terjadi pertikaian atau perpecahan di antara sesama, tetapi meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan.

Sila keempat, **Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan**. Pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia tercermin dari negara menjunjung tinggi kedaulatan atau kekuasaan ada di tangan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam pengambilan keputusan seperti pembuatan peraturan atau kebijakan lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat demi kepentingan bersama, kepentingan bangsa dan negara, tidak didikte oleh golongan mayoritas (diktator mayoritas) atau golongan minoritas (tirani minoritas), tetapi berdasarkan pada demokrasi Pancasila. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Maha Esa serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Kalian sebagai seorang pelajar yang

mengamalkan Pancasila sebagai ideologi negaranya tentu dalam bersikap dan bertindak harus mencerminkan Pancasila, seperti mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, serta dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah sebagai keputusan bersama.

Terkait dengan pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara berdasarkan pada sila keempat Pancasila, coba perhatikan foto di bawah ini, menurut kalian apa yang dimaksud dengan rapat paripurna DPR RI yang tampak pada gambar tersebut? Sebutkan salah satu kewenangan dari lembaga DPR RI dan mengapa hal tersebut menjadi salah satu wujud adanya kedaulatan rakyat yang berdasarkan ideologi Pancasila?



Gambar 5.2 Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat RI

Sumber: liputan6/Johan Tallo/ www.liputan6.com (2022)

Sila kelima, **Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.** Pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara tercermin dari upaya negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan pemenuhan hak-hak warga negaranya, seperti hak mendapatkan pendidikan, sosial, ekonomi, maupun politik. Maka, cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakatnya. Sebagai contoh dalam negara yang berideologi Pancasila maka tambang minyak bumi yang ada di Indonesia harus dikelola oleh negara dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bukan dinikmati oleh segelintir orang.



Gambar 5.3 Tambang minyak bumi dikuasai negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Sumber: Liputan6/M.Iqbal/www.liputan6.com (2022)

Negara yang berdasarkan pada ideologi Pancasila seluruh kebijakan pembangunan yang dilakukan haruslah memperhatikan keadilan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan tidak hanya berpusat pada pulau Jawa, tetapi meliputi seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pembangunan yang dilakukan juga perlu memperhatikan kelestarian alam atau lingkungan hidup di sekitarnya sehingga kerusakan alam dapat diminimalisir atau dihilangkan di wilayah Indonesia yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri.

Kalian sebagai pelajar yang mengamalkan Pancasila sebagai ideologi negara tentu dalam bersikap dan bertindak harus mencerminkan sebagai pelajar yang bersikap adil kepada orang lain, suka menolong, bergotong royong, tidak bergaya hidup mewah, tidak bersifat boros, dan selalu menjaga lingkungan alam di sekitar dengan baik. Sekarang coba kalian berikan contoh pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, yang sesuai dengan sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni dengan melakukan kegiatan seperti bergotong-royong atau membantu orang lain yang bermanfaat pada tabel di bawah ini.

No.	Contoh kegiatan praktik baik bergotong-royong atau membantu orang lain sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi negara
1.	Di Keluarga 1. 2.
2.	Di Sekolah 1. 2.
3.	Di lingkungan sekitar 1. 2.



Penyajian Materi

A. Pancasila sebagai Ideologi Negara

Kalian mungkin sudah pernah mendengar istilah ideologi, atau Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia? Setiap bangsa atau negara tentu memiliki ideologi, yang menjadi arah, ide, gagasan, dan cita-cita bagi suatu bangsa, tidak terkecuali negara Indonesia dalam mencapai tujuan bernegaranya. Sejak diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 maka secara sah berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah kalian tahu syarat sah berdirinya sebuah negara? Terdapat empat unsur penting sebagai syarat sah berdirinya sebuah negara yakni, 1) Rakyat atau semua orang yang berada di wilayah suatu negara, 2) Wilayah yang memiliki batas, (3) Pemerintahan yang berdaulat yaitu pemerintahan yang bisa menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat, dan (4) Kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain.

Berdasarkan unsur atau syarat sah berdirinya sebuah negara, maka negara Kesatuan Republik Indonesia telah memenuhi unsur atau persyaratan sebagai sebuah negara yang merdeka. Sukarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 mengemukakan terkait syarat atau unsur penting berdirinya sebuah negara yang merdeka, berikut teks pidato Sukarno, silakan kalian simak dengan baik ya teks pidato Sukarno di bawah ini.

Untuk menyusun, mengadakan, mengakui satu negara yang merdeka, tidak diadakan syarat yang neko-neko, yang menjelimet, tidak! Syaratnya sekedar bumi, rakyat, pemerintah yang teguh! Ini sudah cukup untuk international recht. Cukup, saudara-saudara. Asal ada buminya, ada rakyatnya, ada pemerintahnya,

kemudian diakui oleh salah satu negara yang lain, yang merdeka, inilah yang sudah bernama merdeka. Tidak peduli rakyat dapat baca atau tidak, tidak peduli rakyat hebat ekonominya atau tidak, tidak peduli rakyat bodoh atau pintar, asal menurut hukum internasional mempunyai syarat-syarat suatu negara merdeka, yaitu ada rakyatnya, ada buminya, dan ada pemerintahnya, – sudahlah ia merdeka.

Negara Indonesia merdeka dengan keanekaragamannya, seperti suku, budaya, agama, bahasa daerah, adat istiadatnya, dan lain sebagainya. Indonesia memiliki wilayahnya yang luas 5.193.250 km persegi, terdiri dari 16.766 pulau dengan jumlah penduduk yang besar tercatat sebanyak 273.879.750 jiwa menurut data kependudukan semester II tahun 2021 yang dirilis Kemendagri pada 30 Desember 2022. Hal tersebut tentu bukan hal yang mudah untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 yang berdasarkan pada Pancasila.

Kalian sebagai warga negara Indonesia dan bagian dari bangsa Indonesia, tentu harus mencintai bangsa dan tanah air dengan sungguh-sungguh, agar tujuan dan cita-cita bangsa dapat terwujud dengan baik. Sukarno menjelaskan bahwa bangsa Indonesia adalah orang-orang yang memiliki ikatan kuat dengan tanah airnya. Dengan mempergunakan istilah “rakyat dan bumi di bawah kakinya”, Sukarno menyampaikan pesan bahwa tanah air adalah sesuatu yang harus dibela dan dijaga karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari manusia-manusia Indonesia yang hidup di dalamnya.

Kita perlu membela dan menjaga tanah air Indonesia yang sudah diproklamasikan dengan penuh perjuangan, pengorbanan, baik harta maupun nyawa dari para pahlawan bangsa. Bagaimana

dengan kalian yang saat ini berstatus pelajar? Kalian sebagai pelajar dapat ikut membela dan menjaga tanah air Indonesia dengan belajar secara baik dan sungguh-sungguh. Bersikap dan berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti taat dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, suka membantu kawan yang membutuhkan, bersikap toleran dan menghargai orang lain yang berbeda, tidak menghina orang lain, tidak melakukan aksi kekerasan, dan selalu mengutamakan musyawarah.

Bersikap dan bertindak sesuai dengan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan kalian mencintai bangsa dan tanah air Indonesia, karena kalau bukan kalian yang mencintai bangsa dan tanah air Indonesia, lalu siapa lagi? Sukarno juga menjelaskan bahwa tanah air Indonesia tidak dapat dipisahkan dari orang-orang yang tinggal di dalamnya tersebut. Sukarno menyatakan dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 sebagai berikut,

Kemarin, kalau tidak salah, saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo, atau Moenandar, mengatakan tentang "Persatuan antara orang dan tempat". Persatuan antara orang dan tempat, tuan-tuan sekalian, persatuan antara manusia dan tempatnya! Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. Ernest Renan dan Otto Bauer hanya sekedar melihat orangnya... Mereka hanya mengingat karakter, tidak mengingat tempat, tidak mengingat bumi, bumi yang didiami manusia itu Apakah tempat itu? Tempat itu yaitu tanah air. Tanah air itu adalah satu kesatuan.

Tujuan negara Indonesia merdeka yang dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia tentu memerlukan ideologi sebagai arah, cita-cita, ide, gagasan, pedoman untuk mencapainya. Apa yang dimaksud ideologi, apakah kalian sudah memahami? Ideologi berasal dari dua kata yaitu bahasa Yunani “ideos” berarti ide dan “logos” berarti ilmu pengetahuan. Secara umum, dengan adanya dua pengertian dari “ideos” dan “logos”, ideologi dapat diartikan sebagai sebuah ide, pemikiran, pengetahuan, atau sesuatu yang dapat dipelajari dan dipraktikkan untuk mencapai tujuan bersama.

Terdapat berbagai macam ideologi di dunia dan setiap negara memiliki ideologi yang dianggap paling sesuai dengan bangsa dan negaranya masing-masing. Amerika Serikat dengan ideologi liberalnya, di mana dalam negara yang berpaham liberal maka kebebasan individu dinilai sebagai satu hal yang utama. Cina dengan komunisnya, di mana negara yang berpaham komunis maka negara menganut sistem satu partai dan, alat-alat produksi dimiliki secara bersama dan diatur oleh negara. Turki dengan sekulernya, di mana dalam negara yang berpaham sekuler maka negara memisahkan urusan agama dengan pemerintahan. Arab Saudi berdasarkan pada Islam, di mana dalam negara yang berideologi agama maka negara mendasarkan pada salah satu agama sebagai agama resmi negaranya. Negara Indonesia di era globalisasi seperti sekarang ini menghadapi berbagai macam tantangan ideologi negara asing lainnya yang tidak sesuai dengan bangsa Indonesia seperti liberalisme, sekulerisme, komunisme, radikalisme dan terorisme.



Gambar 5.4. Tantangan Ideologi Pancasila di era globalisasi

Menurut kalian, bagaimana dengan Indonesia? Apa ideologi yang menjadi dasar atau pedomannya? Negara Indonesia merdeka tidak mendasarkan pada paham liberalisme, komunisme, sekulerisme, dan bukan negara yang mendasarkan pada satu agama tertentu, tetapi Indonesia mendasarkan pada Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Hal ini merupakan hasil kesepakatan bersama para pendiri bangsa yang kemudian pada 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau kita kenal dengan PPKI menetapkan UUD Negara RI Tahun 1945 yang di dalamnya memuat rumusan dasar Pancasila yakni terdapat dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945. Sehingga sejak 18 Agustus 1945, maka Pancasila telah sah menjadi dasar filsafat negara (*filosofische grondslag*) dan pandangan dunia (*Weltanschauung*) atau ideologi negara Indonesia merdeka.

Secara spesifik, ideologi dalam suatu negara dapat dimaknai sebagai suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan, nilai, dan kepercayaan sistematis yang memandu negara mengarahkan

tingkah laku masyarakat untuk mencapai tujuan atau cita-cita bersama. Setiap ideologi idealnya mengandung unsur keyakinan (mitos), pengetahuan, (logos) dan tindakan (etos) sebagai satu kesatuan yang terpadu untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negaranya. Sehingga setiap warga negara Indonesia yang berideologi Pancasila tentunya harus memiliki keyakinan akan kebenaran nilai-nilai Pancasila sebagai tuntunan dan pedoman hidupnya dalam berbangsa dan bernegara. Kita juga diharapkan memiliki pengetahuan yang baik tentang Pancasila dengan nilai-nilainya, dan selanjutnya yang tidak kalah penting yakni keyakinan dan pengetahuan yang kita miliki haruslah dapat diamalkan atau dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat.

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia maka dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan Pancasila karena Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Selanjutnya dalam penjelasan undang-undang tersebut disebutkan bahwa menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus dasar filosofis negara maka setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam

Pancasila, yakni pertentangan dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 maka penyelenggaraan negara dalam segala bidang yang meliputi bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan seharusnya menjadikan Pancasila sebagai bintang penuntun serta pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia menuju masyarakat adil dan sejahtera.

Penerapan Pancasila sebagai ideologi negara dalam bidang politik misalnya ditunjukkan dengan penyelenggara negara yang menjalankan pemerintahan atau kekuasaannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yakni sesuai dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pancasila sebagai ideologi negara, dalam bidang ekonomi maka perekonomian dilaksanakan demi kesejahteraan dan memperhatikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Pancasila sebagai ideologi negara dalam bidang hukum diwujudkan dengan penegakkan hukum yang berkeadilan. Semua orang diperlakukan sama di depan hukum tanpa melihat asal suku,

agama, budaya atau daerahnya, siapa pun yang bersalah maka harus mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya. Di bidang sosial budaya, maka negara memajukan kebudayaan nasional dengan tetap menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya daerahnya yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Untuk memperluas wawasan kalian tentang ideologi, secara berkelompok silakan diskusi dan temukan pengertian ideologi menurut pendapat dari tiga orang ahli atau pakar. Kalian dapat merujuk pada buku-buku yang relevan seperti buku dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang berjudul “Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila”, buku Yudi Latif yang berjudul “Wawasan Pancasila”, atau buku teks pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, dan sebagainya. Tuliskan arti ideologi berdasarkan temuan ke dalam kolom tabel yang tersedia! Buat simpulan pengertian ideologi menurut pendapat kalian berdasarkan pandangan para pakar/ahli tersebut pada tabel di bawah ini!

No.	Nama Ahli/Pakar	Pengertian Ideologi

B. Dimensi Pancasila sebagai Ideologi Negara

Alfian menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara memiliki tiga dimensi atau aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas. Berikut penjelasan dari ketiga dimensi atau aspek yang perlu diperhatikan,

Pertama, dimensi realitas atau kenyataan. Aspek realitas berarti bahwa ideologi merupakan sesuatu yang ada dan dihidupkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hal seperti ini dapat terjadi karena ideologi mengandung nilai-nilai yang berasal dari berbagai unsur budaya maupun pengalaman sejarah masyarakat.

Kedua, aspek idealisme atau harapan. Aspek idealisme berarti ideologi memuat tujuan, cita-cita atau harapan masyarakat yang dipimpinnya tersebut. Hal inilah yang menyebabkan mengapa seluruh masyarakat mau diatur dan ikut menyatu dengan negara. Dengan adanya aspek idealisme atau harapan tersebut, masyarakat akan yakin bahwa negara dan seluruh praktik penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh seluruh aparatnya selalu ditujukan untuk mewujudkan cita-cita atau harapan bersama.

Ketiga, aspek fleksibilitas. Aspek fleksibilitas artinya ideologi memiliki keluwesan atau sifat lentur dalam pelaksanaannya. Hal seperti ini tentu saja penting dimiliki karena tantangan-tantangan yang dihadapi oleh sebuah negara pasti akan berbeda dari zaman ke zaman. Tanpa harus kehilangan jati dirinya, ideologi harus bisa diterapkan oleh negara dan seluruh masyarakat secara fleksibel atau luwes untuk mampu bertahan dan mewujudkan cita-cita bersama yang terkandung di dalamnya.

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki semua aspek atau dimensi sebagai sebuah ideologi seperti yang dikemukakan Alfian, yakni memiliki aspek realitas atau kenyataan, aspek idealisme atau harapan/cita-cita, dan aspek fleksibilitas.

Pertama, pada aspek kenyataan. Dalam hal ini, Pancasila hadir dan dihidupkan oleh seluruh masyarakat Indonesia karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersumber dari masyarakat Indonesia. Nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut.

1. Religiusitas atau sikap keberagamaan bangsa Indonesia

Dalam hal ini, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memuat sikap bangsa Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan tetap mengedepankan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Adat istiadat masyarakat

Ini berarti bahwa sebagai ideologi negara, Pancasila memuat nilai-nilai luhur yang dikandung setiap adat istiadat atau tradisi budaya yang hidup dan berkembang di Indonesia.

3. Kearifan lokal

Dengan adanya sumber ini, Pancasila sebagai ideologi negara mencerminkan kearifan atau kebijaksanaan suku-suku bangsa di Indonesia yang memandang dirinya sebagai manusia yang tak terpisahkan dari alam. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memuat pula unsur-unsur kebajikan para leluhur untuk dapat hidup harmonis dengan orang lain dan lingkungannya.

4. Pemikiran atau ideologi yang berkembang di dunia ketika Pancasila lahir

Hal ini berarti selain mengandung unsur-unsur yang berasal dari dalam masyarakat Indonesia, para pendiri bangsa juga menggagas Pancasila dengan nilai-nilai yang bersumber dari pemikiran atau ideologi lain yang tengah berkembang. Nilai-nilai tersebut tentulah dianggap dapat sejalan dengan kehidupan masyarakat Indonesia, seperti nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, maupun hak asasi manusia yang berasal dari barat atau Eropa.

5. Pola hubungan individu dengan masyarakat yang sudah menjadi bagian dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam hal ini, Pancasila sebagai ideologi negara memiliki nilai-nilai yang dianggap mampu menyatukan seluruh perbedaan yang ada dalam rangka menggapai cita-cita bersama. Seperti yang tercermin dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, Pancasila sebagai ideologi negara selalu menghendaki hubungan antar manusia atau individu adalah hubungan yang harmonis, rukun, dan menyatu meski dilatarbelakangi oleh perbedaan suku, adat istiadat, dan agama.

Kedua, aspek idealisme atau harapan. Sebagaimana telah disinggung di atas, aspek harapan atau cita-cita mengandung makna bahwa ideologi negara memuat tujuan dan cita-cita atau harapan masyarakat yang dipimpinnya. Dengan adanya aspek idealisme atau harapan ini, Pancasila sebagai ideologi negara dapat dilihat sebagai sebuah kumpulan nilai yang memandu negara untuk

mewujudkan tujuan atau cita-cita yang dimiliki, yaitu menciptakan kehidupan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Dengan kedudukannya tersebut, Pancasila sering disebut juga dengan istilah “bintang pemandu” atau “bintang penuntun” (leitstar). Sebuah sumber cahaya yang memberikan sinar pengetahuan, serta harapan bagi negara agar seluruh aparat negara selalu paham dan bersemangat untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan melalui pembangunan nasional yang dilakukan.

Ketiga, aspek fleksibilitas atau keluwesan/lentur. Dengan hadirnya aspek ini, Pancasila dapat dilihat sebagai ideologi negara yang mampu menjawab berbagai tantangan dari zaman ke zaman karena diterapkan oleh negara dan seluruh masyarakatnya secara luwes. Tanpa harus meninggalkan hal-hal yang bersifat prinsip atau mendasar, negara dan seluruh masyarakat Indonesia harus mengamalkan Pancasila menjadi sekumpulan gagasan atau ide penuntun dinamis (leitstar dinamis) dan mampu mengantisipasi berbagai permasalahan bersama yang semakin lama semakin kompleks atau rumit.

Di tengah tantangan yang semakin rumit seperti itu, kalian tentu sadar bahwa ada kecenderungan saat ini masih ada individu yang belum menjalankan atau mengamalkan Pancasila dalam praktik kehidupan sehari-harinya. Kalian juga pasti tahu bahwa berbagai hal yang merugikan bangsa dan negara telah terjadi akibat berbagai perilaku buruk individu yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Selain terjadi di lingkungan sosial, seperti intoleransi, kekerasan, dan lain sebagainya, berbagai dampak atas ditinggalkannya Pancasila juga memiliki bukti nyata pada terjadinya kerusakan lingkungan hidup di beberapa wilayah Indonesia.

Oleh karena itu, ketika ingin mengartikan Pancasila sebagai ideologi negara yang bersifat dinamis (leitstar dinamis), kalian harus menyadari bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus mampu memandu negara dalam menghasilkan pembangunan dan mampu menjawab berbagai tantangan termasuk di antaranya kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia.

C. Fungsi Ideologi Pancasila bagi Bangsa dan Negara Indonesia

Kalian tentu sudah memahami arti ideologi bagi suatu negara. Suatu negara tentu memiliki ideologinya masing-masing yang merupakan pedoman, arah, cita-cita bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sukarno dalam pidato di Perserikatan Bangsa-bangsa pada 30 September 1960 mengungkapkan pentingnya konsepsi dan cita-cita bagi suatu bangsa, bahwa jika mereka tidak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu berada dalam bahaya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya Pancasila sebagai ideologi bagi negara Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang dicita-citakan.

Pancasila sebagai ideologi negara merupakan visi atau pemandu arah kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Visi tersebut yakni terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suwarma mengemukakan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu:

1. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia yang majemuk dengan beragam suku, agama, budaya, dan adat istiadatnya dipersatukan dengan satu ideologi Pancasila.

2. Mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan, menggerakkan dan membimbing bangsa Indonesia dalam mewujudkan pembangunan nasional.
3. Memelihara dan mengembangkan identitas bangsa Indonesia yakni identitas, atau karakter bangsa Indonesia yang berdasarkan pada ideologi Pancasila
4. Menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi bangsa Indonesia.

Sekarang coba diskusikan dengan teman-teman di kelasmu, menurut kelompok kalian apa fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia? Mengapa Pancasila dinilai yang paling tepat dijadikan ideologi negara Indonesia? Tuliskan hasil diskusi kelompok kalian pada tabel di bawah ini!

Pertanyaan	Jawaban
Tuliskan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia	1. 2. 3.
Alasan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang paling tepat	1. 2. 3.



Refleksi

Untuk mendalami lebih lanjut mengenai Pancasila sebagai ideologi negara, mari kita melakukan refleksi atas materi yang telah dipelajari. Pancasila sebagai ideologi negara dapat diwujudkan dengan adanya upaya sungguh-sungguh yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya dengan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup sehingga dapat memberikan kontribusi dan kemaslahatan bagi masyarakat yang maju, sejahtera, dan berkeadilan sebagaimana cita-cita dan tujuan dari bangsa dan negara Indonesia yang berpancasila.

Kalian sebagai pelajar sekaligus sebagai warga negara Indonesia tentu memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup disekitarmu. Coba tuliskan kebiasaan apa yang kalian lakukan yang dapat berdampak positif terhadap kelestarian lingkungan di sekitarmu! Apa kira-kira manfaat yang dapat diperoleh dari kebiasaan yang sudah kalian lakukan? Selanjutnya, apa rencana tindak lanjut yang dapat kalian lakukan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitarmu? Buatlah dalam bentuk tabel seperti di bawah ini di buku tugas kalian! Diskusikan dengan rekan-rekan atau guru kalian jika ada yang belum kalian pahami.

No.	Kebiasaan yang dilakukan yang berdampak positif terhadap kelestarian lingkungan	Manfaat yang dapat diperoleh	Rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan



Asesmen

A. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar!

1. Jelaskan arti Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia!
2. Jelaskan tiga dimensi atau aspek yang terdapat dalam ideologi!
3. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki nilai-nilai dasar yang tidak bisa diubah dan berusaha untuk terus diimplementasikan oleh warga negaranya. Sebutkan dan jelaskan nilai-nilai dasar tersebut!
4. Jelaskan wawasan lingkungan yang terdapat dalam nilai-nilai Pancasila sila ketiga!
5. Mengapa Pancasila disebut dengan istilah leitstar dinamis?

B. Membuat Poster Infografis

Secara berkelompok kalian membuat poster infografis secara kreatif dalam satu lembar kertas HVS ukuran A4/F4 mengenai perlindungan lingkungan hidup di sekitarmu. Isi infografis yang kalian buat merupakan pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sebagai contoh kalian bisa membuat infografis terkait dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh negara atau masyarakat sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup serta memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Setelah selesai dibuat, presentasikanlah hasilnya di depan kelas dengan bimbingan guru!



Glosarium

ANRI	: Arsip Nasional Republik Indonesia
Birokrat	: Pegawai pemerintahan
BPUPK	: Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan
<i>Chauvinistik</i>	: Rasa cinta tanah air secara berlebihan dengan mengagung-agungkan bangsa sendiri sehingga merendahkan bangsa lain
Demokrasi	: Bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya
<i>Filosofische Grondslag</i>	: Kata dalam bahasa Belanda yang berarti filsafat atau pikiran yang menjadi dasar dari sebuah negara
Foto repro	: Foto yang berisi pengulangan gambar pada foto pertama.
Ideologi	: Cara pikir, pandangan, sistem kepercayaan, rumusan cita-cita, nilai, dan sudut pandang dunia (<i>world view</i>)
<i>Leitstar dinamis</i>	: Satu istilah yang diberikan kepada Pancasila dengan kedudukannya sebagai sekumpulan gagasan atau ide yang memberikan tuntunan bagi bangsa dan negara Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan zaman yang semakin lama semakin berubah.

Kedaulatan	: Kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya
Kolonial	: Penjajahan yang dilakukan oleh negara penguasa dalam rangka memperluas wilayah kekuasaan
Komunisme	: Paham atau ideologi yang hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantikannya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara
Konstitusi	: Segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegara-an (undang-undang dasar dan sebagainya)
Konstitusional	: Suatu hal yang sesuai dengan atau diatur oleh konstitusi suatu negara
Kontroversi	: Perdebatan
Liberalisme	: Paham yang mengutamakan kebebasan individu dalam berbagai bidang kehidupan
<i>Preamble</i>	: Pendahuluan; pembukaan
Negara	: Lembaga yang mengusahakan suatu kesatuan politik untuk menata masyarakat dan menguasai wilayah
Nilai	: Penuntun bagi seseorang dalam memandang dan menilai kondisi di sekitarnya dan hubungannya dengan alam semesta. Dari tuntunan nilai itu, manusia bisa menentukan apa yang disebut kebaikan dan keburukan dalam suatu kondisi dan lingkungan tertentu

Normatif	: Berpegang teguh pada norma; menurut norma atau kaidah yang berlaku
Pangreh Praja	: Pegawai pemerintah pribumi tingkat lokal pada masa pemerintahan kolonial
PPKI	: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Radikalisme	: Paham yang menghendaki perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis
Sekularisme	: Paham yang berusaha memisahkan urusan agama dengan urusan negara atau pemerintahan
<i>Staatfundamentalnorm</i>	: norma hukum tertinggi suatu negara dan menjadi dasar pembentukan konstitusi
<i>staatvervasung</i>	: Konstitusi negara
Terorisme	: Paham penggunaan kekerasan dengan maksud menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan.
Universal	: Umum (berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia); bersifat (melingkupi) seluruh dunia
<i>Weltanschauung</i>	: Pandangan hidup sebuah kelompok masyarakat atau bangsa
Wawasan	: Konsepsi; cara pandang; tinjauan; pandangan
Yuridis	: Menurut hukum

Daftar Pustaka

- Al Muchar, Suwarma. 2016. Ideologi Pancasila kajian Filsafat Teori Politik dan Pendidikan. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Anderson, B. 2006. Imagined communities: Reflections on The Origin and Spread of Nationalism. New York: Verso books.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. 2020. Pameran Arsip Virtual Lahirnya Pancasila. Online: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Asroni, A. dan Hakim, A.L. 2021. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: UII Press
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI. 2020. Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila. Jakarta: Kedeputan Bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia
- Bakry, Noor Ms. 2010. Pendidikan Pancasila. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. 2022. Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila. Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
- Budiardjo, M. 1998. Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Christiawan, P. I. 2018. "Cultural landscape: A bridge between deforestation and local community?". Journal of Landscape Ecology. 11(2). 77-87.

- Daradjadi dan Ilham, Osa Kurniawan. 2020. Pejambon 1945: Konsensus Agung Para Peletak Fondasi Bangsa. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Fatimah, Nuraini. 2018. Apresiasi Kebinekaan Melalui Pembelajaran Penggunaan Ujaran Toleran (Verbal Tolerance) Pada Siswa Usia Dini. Makalah Kongres Bahasa Indonesia Tidak Diterbitkan. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2011. Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional. Jakarta: Graha Ilmu.
- Handayani, Hawa Laily. 2020. "Perilaku Negatif Siswa: Bentuk, Faktor Penyebab, dan Solusi Guru dalam Mengatasinya". Jurnal Elementary School. 7. 215-224.
- Handoko, Victoria Sundari. 2020. "The Construction of Vocational Education and Training in Hospitality for Poverty Alleviation in Sumba". e-Review of Tourism Research (eRTR). Vol. 18. Nomor.3. pp. 393–408.
- Hatta, Mohammad. 2015. Politik, Kebangsaan, Ekonomi (1926 - 1977). Jakarta: PT. Kompas Gramedia
- Herkusumo, Arniati Prasedyawati. 1984. Chuo sangi-in Dewan Pertimbangan Pusat pada masa pendudukan Jepang. Jakarta; Rosda Jayaputra
- Kaelan. 2015. Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila. Yogyakarta: Paradigma

- Kusuma, R.M. A.B. 2004. Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Latif, Yudi. 2020. Wawasan Pancasila Edisi Komprehensif. Jakarta: Mizan
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2017. Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI
- MoFA Indonesia. 2021. "Virtual Tour Gedung Pancasila" diakses melalui <https://youtu.be/BQ6FB5VqSBY> pada 12 September 2022, Pukul 01: 32 WIB
- Nurwardani, Paristiyanti, dkk. 2016. Pendidikan Pancasila. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
- Oesman, Oetojo dan Alfian (Ed.). 1991. Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Jakarta: BP-7 Pusat
- Pamungkas, Septian Dwi. 2011. "Pancasila sebagai Ideologi Negara dan Pandangan Hidup Bangsa" (Makalah), Yogyakarta: STMIK Amikom
- Poesponegoro, M.D., dan Notosusanto, Nugroho. 2008. Sejarah Indonesia Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka.
- Samekto, FXAdji. 2019. Pancasila: Dialektika dan Masa Depan Bangsa. Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia
- _____. 2020. "Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Negara

Kesejahteraan Berdasarkan Pancasila. Majalah Prisma. Jakarta: LP3ES.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. t.t. Himpunan Risalah Sidang-sidang dari BPUPK dan PPKI yang Berhubungan dengan Penyusunan UUD 1945. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Subardjo, Ahmad. 1977. Lahirnya Republik Indonesia. Bandung: Kinta

Sundawa, Dadang, dkk. 2008. Contextual Teaching and Learning. Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah Kelas VIII Edisi 4. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional

Thaib, Dahlan. 1994. Pancasila Yuridis Ketatanegaraan. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.

Daftar Kredit Gambar

Bab I

Gambar 1.1

Diunduh dari:

<https://travel.kompas.com/image/2020/06/01/093000027/hari-pancasila-simak-sejarah-dan-fakta-menarik-gedung-pancasila?page=1> diakses pada 18 September 2022 pukul 10.00 WIB

Gambar 1.2

Diunduh dari:

https://collectie.wereldculturen.nl/?query=search=*=TM-3728-779#/query/bd274a12-b8ef-4360-b6eb-05f7d31b7e8b diakses pada 18 September 2022 pukul 11.00 WIB

Gambar 1.3

Diunduh dari:

https://mmc.tirto.id/image/otf/700x0/2017/05/31/HL-pancasila-tirto1_ratio-16x9.jpg diakses pada 18 September 2022 pukul 14.00 WIB

Gambar 1.4.

Diunduh dari:

<https://travel.okezone.com/read/2017/06/01/406/1705457/menjejak-kemegahan-gedung-pancasila> diakses pada 18 September 2022 pukul 15.00 WIB

Gambar 1.5

Diunduh dari:

<https://kumparan.com/berita-hari-ini/bagaimana-proses-sidang-resmi-yang-dilaksanakan-bpupki-1uhxgYl1s3t/3> diakses pada 6 November 2022 pukul 16.51 WIB

Gambar 1.8.

Soeara Asia/Kompas, 2020. *Anggota-anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia*. Harian Kompas edisi 28 Agustus 2020.

Gambar 1.9.

Diunduh dari:

<https://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/16/13324231/museum.perumusan.naskah.proklamasi.gelar.napak.tilas.proklamasi> diakses pada 6 November 2022 pukul 17.10 WIB

BAB II

Gambar 2.1

Diunduh dari

<https://www.kompasiana.com/www.inatanaya.com/5b12811c5e13730a7132f552/sumba-foundation-hospitality-mendobrak-kemiskinan-di-sumba> diakses pada 6 November 2022 pukul 17.12 WIB

Gambar 2.2

Diunduh dari

<https://www.kompasiana.com/www.inatanaya.com/5b12811c5e13730a7132f552/sumba-foundation-hospitality-mendobrak-kemiskinan-di-sumba> diakses pada 6 November 2022 pukul 17.15 WIB

Gambar 2.3

Diunduh dari

<https://foto.tempo.co/read/100300/aksi-jurnalis-cilik-dan-relawan-pungut-sampah-di-kawasan-cilincing> diakses 4 Oktober 2022 pukul 13.09 WIB

<https://www.republika.co.id/berita/pz8yr2313/ada-relawan-cilik-di-jambore-nasional-penanggulangan-bencana> diakses 4 Oktober 2022 pukul 13.11 WIB

Gambar 2.4

Diunduh dari

<https://bogordaily.net/wp-content/uploads/2020/02/IMG-20200208-WA0008.jpg> diakses 4 Oktober 2022 pukul 13.30 WIB

Gambar 2.7

Diunduh dari:

Bali Puspa News, 2017. *Foto Ilustrasi Keberagaman Budaya di Indonesia*.

<https://asset.balipuspanews.com/wp-content/uploads/2017/08/Karnaval-SMP-SMASMK-ditampilkan-kebudayaan-Nusantara-disaksikan-Bupati-Suwirta.jpg> diakses pada 5 Oktober 2022

Gambar 2.8

Diunduh dari:

<https://images.bisnis-cdn.com/posts/2022/01/28/1494517/suaraulang250419-1.jpg> diakses 4 Oktober 2022 pukul 14.00 WIB

Bab III

Gambar 3.1

Diunduh dari:

<https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/02/083000169/urgensi-pancasila-sebagai-dasar-negara> diakses pada 10 Oktober 2022 pukul 15.44 WIB

Gambar 3.2

Diunduh dari:

<https://ditsmp.kemdikbud.go.id/perlukah-bijak-dalam-bermedia-sosial/> diakses pada 10 Oktober 2022 pukul 15.54 WIB

Gambar 3.4

Diunduh dari:

<http://smpn9batam.sch.id/berita/detail/ketentuan-dan-jadwal-kegiatan-masa-pengenalan-lingkungan-sekolah-mpls-smp-negeri-9-batam>

diakses pada 10 Oktober 2022 pukul 16.13 WIB

Gambar 3.5

Diunduh dari:

<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/30/09330681/dpr-tetapkan-tata-cara-pelaksanaan-rapat-paripurna-khusus-di-tengah-wabah?page=all> diakses pada 10 Oktober 2022 pukul 16.20 WIB

Bab IV

Gambar 4.1

Diunduh dari:

<https://duren-tugu.trenggalekkab.go.id/first/artikel/112-MUSYAWARAH-DESA-PENYUSUNAN-RKP-DESA-TAHUN-2021> diakses pada 10 Oktober 2022 pukul 13.15 WIB

Gambar 4.2

Diunduh dari:

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tangerang1/baca-berita/20629/Raih-Berkah-Ramadhan-Dengan-Saling-Berbagi-Di-Masa-Pandemi.html> diakses pada 10 Oktober 2022 pukul 13.26 WIB

Gambar 4.3

Diunduh dari:

<https://smkn1gombong.sch.id/stemsago/blog/hormati-guru/> diakses pada 10 Oktober 2022 pukul 14.04 WIB

Gambar 4.4

Diunduh dari:

<https://sulteng.antaranews.com/foto/227861/semangat-gotong-royong-masyarakat-desa> diakses pada 10 Oktober 2022 pukul 14.10 WIB

Gambar 4.5

Diunduh dari:

<https://metro.tempo.co/read/1619528/pelajar-smp-kabupaten-tangerang-dilarang-bawa-motor-ke-sekolah-bupati-pakai-sepeda-saja-lebih-sehat> diakses pada 10 Oktober 2022 pukul 14.17 WIB

Gambar 4.6

Diunduh dari:

<https://kumparan.com/kumparantech/riset-64-penduduk-indonesia-sudah-pakai-internet-1ssUCDbKILp/full> diakses pada 10 Oktober 2022 pukul 14.28

Gambar 4.7

Diunduh dari:

<https://jogja.tribunnews.com/2018/01/23/smpn-5-yogyakarta-gelar-latihan-dasar-kepemimpinan-untuk-anggota-osis> diakses pada 10 Oktober 2022 pukul 14.41 WIB

Bab V

Gambar 5.2

Diunduh dari:

<https://www.liputan6.com/news/read/3893988/dpr-lantik-pengganti-terdakwa-kasus-suap-bakamla-fayakhun-andriadi> diakses pada 29 Oktober 2022 Pukul 16.29

Gambar 5.3.

Diunduh dari:

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2081639/produksi-minyak-dua-perusahaan-di-papua-lebihi-target> diakses pada 29 Oktober 2022 Pukul 16.38.



Profil Penulis

Nama Lengkap : Hilwan Givari
Email : g2givari@gmail.com
Instansi : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Alamat Instansi : Jl. Veteran III No. 2 Gambir, Jakarta Pusat
Bidang Keahlian : **Politik dan Ideologi**



■ Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Analis Kebijakan
2. Dosen/Pengajar Ilmu Politik

■ Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. S1 Ilmu Politik, 2014 – 2017 (selesai)
2. S2 Ilmu Politik, 2018 – sekarang (sedang berjalan)

■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Pancasila: Dialektika dan Masa Depan Bangsa (editor)
2. Ketuhanan Yang Maha Esa: Perspektif Lintas Iman (editor)
3. Negara Hukum dalam Bingkai Pancasila (editor)

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Adaptasi Sirkulasi Patron dalam Implementasi Sentralisme Demokratik Partai Komunis Vietnam dalam Kongres pada era “Doi Moi (2018)
2. Ekonomi Pancasila (2022)

Nama : Dr. Raharjo, S.Pd., M.Si.
Lengkap
Email : raharjo@unj.ac.id
Instansi : UNJ
Alamat : Jln. Rawamangun Muka,
Instansi Rawamangun, Jakarta
Bidang : Pendidikan Pancasila dan
Keahlian Kewarganegaraan



■ **Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):**

1. Dosen Tetap Universitas Negeri Jakarta Tahun 2005-sekarang
2. Dosen Luar Biasa STIKES RS Husada Tahun 2005- sekarang
3. Tutor Universitas Terbuka Tahun 2004- Sekarang
4. Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik FIS UNJ tahun 2007-2015
5. Pemimpin Redaksi Jurnal Mimbar Demokrasi Tahun 2006-2008, Tahun 2022-sekarang
6. Guru Bantu di SMK Muara Indonesia 2002-2005

■ **Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:**

1. S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Jakarta, Tahun lulus 2002
2. S2 Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Tahun lulus 2009
3. S3 Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia, Tahun lulus 2022

■ **Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):**

1. Ilmu Negara Edisi 2, Penerbit: Universitas Terbuka, Tahun 2019
2. Teori Sosial dan Kewarganegaraan, Penerbit Widya Aksara Press, Tahun 2016
3. Statistika Pendidikan Dengan Aplikasi SPSS, Penerbit LPP Press UNJ, Tahun 2015
4. Strategi Pembelajaran PPKn Berbasis KKNI, Penerbit LPP Press UNJ, Tahun 2015

■ **Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):**

1. Pengembangan Pendekatan Appreciative Inquiry Pada Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Universitas Negeri Jakarta (Ketua), Tahun 2022.
2. Pengembangan Model Pembelajaran Isu Kontroversial Pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Di Universitas Negeri Jakarta (Ketua), Tahun 2021
3. Pengembangan E-Learning Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Berbasis Web di Universitas Negeri Jakarta (Ketua), tahun 2020
4. Kearifan Lokal Untuk Merawat Toleransi Sosial di Indonesia (Anggota), tahun 2020
5. Model Pendidikan Idiologi Pancasila dalam Pengembangan Kurikulum MPK Di Perguruan Tinggi (Ketua), tahun 2018
6. Pengembangan e-learning mata kuliah Strategi Pembelajaran PPKn Berbasis Web di Program Studi PPKN FIS UNJ (Ketua), tahun 2015

Nama : Muhammad Sapei, S.Pd.I
E-mail : muhammad.syafiie@yahoo.com
Instansi : Yayasan Pengembangan Insani
Bidang : 1. Pendidikan dan
Keahlian Pengembangan SDM
Penulisan dan Perbukuan

2. Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan



■ **Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):**

1. 2022 – sekarang : Fasilitator Sekolah Penggerak
Kemdikbudristek
2. 2022 – sekarang : Direktur Yayasan Pengembangan
Insani
3. 2017 – 2021 : Direktur Dompot Dhuafa Pendidikan
4. 2015 – 2017 : GM SMART Ekselensia Indonesia Boarding
School
5. 2014 – 2015 : Manajer Litbang Makmal Pendidikan
6. 2013 – 2014 : Kepala SD Islam Al-Syukro Universal

■ **Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:**

S-1 Pendidikan Agama Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
(2001 – 2005)

■ **Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):**

1. Seni Menjalani Hidup Penuh Makna (Quanta-Elex Media, 2020)
2. Guru Sang Arsitek Peradaban (SR Institute, 2019)
3. Menjadi Bunda yang Dirindukan (Quanta-Elex Media, 2018)
4. Perempuan Dambaan Surga (Quanta-Elex Media, 2016)
5. Tuhan, Tunggu Sebentar Lagi (Quanta-Elex Media, 2015)

■ **Judul Penelitian/Artikel dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):**

1. Wakaf dan Distribusi Kesejahteraan (Koran Republika, 27 Agustus 2022)
2. Sintesis Model Pesantren (Koran Republika, 12 November 2021)
3. Wakaf dan Kemandirian Pesantren (Koran Republika, 23 Oktober 2021)
4. Covid-19 dan Paradigma Belajar (Koran Republika, 24 Maret 2020)
5. Mengkaji Ulang Makna Remaja (Koran Republika, 10 Maret 2020)
6. Wakaf untuk Pendidikan (Koran Republika, 6 Desember 2019)
7. Masa Depan Sekolah Formal (Koran Republika, 7 Juni 2018)
8. Zakat Learning Design Related to Professional Character Through Entrepreneurship Taking Course in SMA SMART Ekselensia Indonesia (Institut Pendidikan Batu Lintang Malaysia, 2014)

Profil Penelaah

Nama : Dr. At. Sugeng Priyanto, M.Si
Lengkap
Email : atsugeng@mail.unnes.ac.id
Instansi : Universitas Negeri Semarang
Alamat : Sekaran, Gunungpati,
Instansi Kota Semarang
Bidang : PPKN
Keahlian



■ Riwayat Pekerjaan/Profesi

1. Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
2. Dosen Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.

■ Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar

S-3 Ilmu Agama dan Lintas Budaya UGM Yogyakarta, 2015.

■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)

1. Kemajuan di Era Global, Modul Sejarah Peminatan Paket C Setara SMA/MA Kelas XII, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus–Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah–Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020..

2. Merajut yang Terkoyak, Modul Sejarah Peminatan Paket C Setara SMA/MA Kelas XII, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus–Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah–Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.
3. Dunia di Ambang Batas, Modul Sejarah Peminatan Paket C Setara SMA/MA Kelas XII, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus–Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah–Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.
4. Inspirasi Contoh Soal Ujian yang Diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan Tingkat SMP, Direktorat SMP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.
5. Education From The Urban Marginal Society's Perspective, Taylor and Francis Group, 2020.

Nama : Dr. Suhadi, S.H., M.Si.

Lengkap

Email : suhadi@mail.unnes.ac.id

Instansi : FH Universitas Negeri
Semarang

Alamat : Kampus UNNES Sekaran

Instansi : Gunungpati Semarang

Bidang : **Hukum Agraria, Politik Hukum**

Keahlian



■ **Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):**

Dosen PNS FH Universitas Negeri Semarang

■ **Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:**

1. S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan IKIP Semarang Tahun 1992
2. S-1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro S-1 Tahun 2007
3. S-2 Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada Tahun 2002
4. S-3 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2019

■ **Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):**

1. Aspek Hukum dan Sosial Rumah Susun (2017)
2. Dinamika Perolehan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan PLTU Batang (2018)

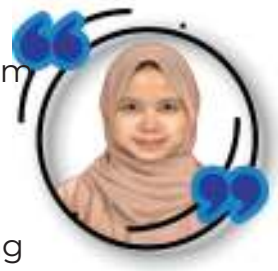
3. Politik Hukum Ketahanan Pangan : Respon Pemda Atas Kebijakan Negara Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (bersama Sudijono Sastroatmodjo, Dani Muhtada) (2019)
4. Regulasi dan Implementasi Ganti Kerugian tanah Desa dan Tanah Wakaf Dalam Pengadaan Tanah (2020)
5. Surveyor Berlisensi dan Masa Depan Pendaftaran Tanah di Indonesia (2021)
6. Aspek Struktur dan Budaya Hukum Perlindungan Lahan Pertanian Pangan (2022-proses terbit)

■ **Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):**

1. Pola Perubahan Tanah Desa Menjadi Tanah Perseorangan (Kajian Perubahan Tanah Norowito Menjadi Hak Milik di Kabupaten Kendal) (2022)
2. Model Pengaturan Kewenangan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dalam Pendaftaran Tanah Pasca Terbitnya Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 9 Tahun 2021 (tahun 2021)
3. Model Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Berdasarkan Konteks Penguasaan Tanah (tahun 2020)
4. Model Pengaturan Perolehan Tanah Bagi Pembangunan Infrastruktur Untuk Kepentingan Umum Melalui Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Swasta (tahun 2019)

Profil Penyunting

Nama Lengkap : Rosyadah Khairani
Email : rosyadahkhairani5@gmail.com
Instansi : UIN Jakarta
Alamat Instansi : Jl. Ir H. Juanda No.95, Cemp.
Putih, Ciputat Tim., Tangerang
Selatan, Banten 15412
Bidang Keahlian : **Mengajar, komunikasi, dan
kepenulisan**



■ Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Guru Homeschooling Jakarta Selatan
2. Asisten Dosen Bahasa Indonesia Universitas Moestopo

■ Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

Nasionalisme, Cinta, dan Kemurnian Etnik; Pertentangan Adat dalam Novel-Novel Pasca-Kemerdekaan (Jurnal Suluk)

Profil Ilustrator

Nama : Aditya Candra Kartika
Lengkap
Email : aditya.aceka@gmail.com
Instansi : SMK Marsudirini Marganingsih
Surakarta
Alamat : Jl. Madyotaman 1/22 Surakarta
Instansi
Bidang : **Seni Rupa dan Desain**
Keahlian



■ **Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):**

Guru Mapel Produktif DKV dan Seni Budaya di SMK Marsudirini Marganingsih Surakarta (2018-sekarang)

■ **Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:**

Pendidikan Seni Rupa FKIP UNS Surakarta (2016)

■ **Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):**

1. Buku Siswa Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti Kelas I (Ilustrator - 2021)
2. Buku Guru Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti Kelas I (Ilustrator – 2021)
3. Buku Siswa Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti Kelas IX (Ilustrator - 2021)
4. Buku Guru Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti Kelas IX (Ilustrator – 2021)
5. Buku Siswa Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti Kelas XII (Ilustrator - 2021)

6. Buku Guru Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti Kelas XII (Ilustrator – 2021)
7. Buku Panduan Guru Prakarya: Pengolahan Kelas VII (Ilustrator – 2022)
8. Buku Panduan Guru Prakarya: Pengolahan Kelas X (Ilustrator – 2022)

Profil Desainer

Nama Lengkap : Muhammad Qodry R

Email : Qodrymuhammad35
@gmail.com

Instansi : Desain Grafis

Alamat Instansi : Bogor, Indonesia.

Bidang Keahlian : **Graphic Designer & Layouter**



■ Riwayat Pekerjaan/profesi (10 Tahun Terakhir):

Graphic Designer - Freelancer

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

D3 - Bina Sarana Informatika - Advertising 2020

■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. English in Mind Cambridge university Press Grade 12 (2021)
2. Buku Guru English for Nusantara kelas VII (2022)



